

Cuti ke Tiongkok, Gubernur Khofifah Tak Penuhi Panggilan KPK

SURABAYA, BN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dipastikan tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kepada kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Khofifah tercatat sedang menjalani cuti untuk kepentingan pribadi, yakni menghadiri prosesi wisuda putranya, Jalaluddin Mannagalli



Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa. (ist)

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

PROYEK BKK DESA DOROGOWOK DIDUGA JADI BANCAKAN



LUMAJANG, BN - Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur berupa Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) dari salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang ditempatkan di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dengan nilai sangat fantastis Rp 1. 475.000.000, - (1,475 Miliar), berupa bangunan drainase 3 Dusun di Lokasi yang berbeda : Dusun Panggung Gempol, Dusun Wringin Sari, Dusun Karangrejo.

Novi sebagai bendahara desa Dorogowok didampingi Herman Kaur Perencanaan, pada saat dikonfirmasi

Bidik Nasional (BN) Selasa (25/03/2025) jam 12.06 WIB di Balai Desa Dorogowok menyampaikan secara detail penempatan lokasi proyek, transferan masuk senilai Rp. 1,475 Miliar, sampai uang tersebut diambil semua oleh Kades Sura'i. "Tapi uang itu dibawa kemana dan acara apa dengan siapa, saya tidak tahu," kata Novi jujur.

Menurut sumber BN anggaran tersebut terserap di

■ Bersambung ke hal.10 kol.1



Novi Bendahara Desa bersama KAUUR pada saat dikonfirmasi BN, Selasa (25/03/2025) pukul 12.06 WIB. (SON)



Proyek drainase Dusun Panggung Gempol Desa Dorogowok.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024	
JENIS KEGIATAN	: PEMBANGUNAN DRAINASE DESA
NOMOR SURAT	: 100.3.3.1/630/KPTS/013/2024
LOKASI DAN VOLUME	: DUSUN PANGGUNG GEMPOL 870 M
SUMBER DANA	: BKK PROVINSI JAWA TIMUR
TOTAL ANGGARAN	: Rp.1.113.399.527
WAKTU PELAKSANAAN	: JANUARI s.d APRIL
PELAKSANA KEGIATAN	: TIMLAK KEGIATAN

Edan, Kejagung Sita Rp 11,8 Triliun Kasus Ekspor CPO Wilmar Group



Kejagung saat menggelar jumpa pers kasus dugaan korupsi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Wilmar Group. (ist)

JAKARTA, BN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita Rp11.880.351.802.619 atau lebih dari Rp11,8 triliun terkait dengan dugaan korupsi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Wilmar Group. Penyitaan ini dilakukan dalam tingkat penuntutan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

"Bahwa dalam perkemba-

■ Bersambung ke hal.10 kol.1

PROYEK BRONJONG SUNGAI DERMAJI TAYEMTIMUR RUSAK JALAN SEKOLAH DAN MINIM KOORDINASI



Proyek Bronjong Sungai Dermaji Tayemtimur yang dikeluhkan warga. (Asep sujana)

tidak dimulai dari hulu sungai hanya memberikan perlindungan sementara.Sedang lahan warga di bagian atas sungai tetap tergerus. "Kalau tidak dari hulu, air tetap menghantam bagian atas dan merusak yang sudah dibangun di bawah," tambahnya.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

❑ Kontraktor Diduga "Khianati" PPK OP SDA 2 BBWS Citanduy

CILACAP, BN – Proyek pemasangan bronjong di aliran Sungai Dermaji, tepatnya di belakang SMP Ahmad yani Desa Tayem Timur, kecamatan Karang Pucung kabupaten Cilacap, mendapat sorotan tajam dari Kepala Desa Tayem Timur Darsono Padilah. Selain dinilai kurang efektif karena tidak dimulai dari hulu, proyek ini juga disebut merusak akses jalan ke sekolah akibat lalu lintas kendaraan pengangkut material (langsir) yang melewati jalur tersebut.

"Sejak awal pekerjaan, tidak ada komunikasi dari pihak pemborong dengan pemerintah desa. Padahal proyek ini berada di wilayah kami dan berdampak langsung ke warga," ujar Darsono saat dikonfirmasi di kantor desa Jumat, 13 Juni 2025.

Darsono menegaskan, pemasangan bronjong yang tidak dimulai dari hulu sungai hanya memberikan perlindungan sementara.Sedang lahan warga di bagian atas sungai tetap tergerus. "Kalau tidak dari hulu, air tetap menghantam bagian atas dan merusak yang sudah dibangun di bawah," tambahnya.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Proyek talud di desa Rowoyoso tanpa papan informasi. (Dikin)

sulit bagi publik dan lembaga pengawas seperti media maupun LSM untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Proyek Talud di Desa Rowoyoso Pekalongan Tanpa Papan Informasi, Diduga Langgar UU KIP

PEKALONGAN, BN – Proyek pembangunan talud di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan menjadi sorotan setelah diketahui tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek. Kondisi ini dinilai melanggar prinsip transparansi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pantauan di lokasi pada Senin (9/6/2025) menunjukkan bahwa pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut berjalan tanpa adanya papan proyek yang memuat informasi dasar seperti jenis kegiatan, lokasi, volume pekerjaan, nilai kontrak, hingga jangka waktu pelaksanaan. Padahal, kewajiban pemasangan papan proyek telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbarui melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Ketiadaan papan informasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Tanpa transparansi data, sulit bagi publik dan lembaga pengawas seperti media maupun LSM untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Kecoh Ribuan Massa, PN Sidoarjo Sukses Eksekusi Lahan 9,8 Ha di Tambakoso Waru



PN Sidoarjo, saat bacakan penetapan Eksekusi disalah satu bidang obyek sengketa di Tambakoso, Waru. (ist)



Abdul Salam, Kuasa Hukum PT Kejayan Mas. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN – Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo akhirnya berhasil mengeksekusi lahan sengketa seluas 9,85 hektare di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Rabu (18/6/2025). Eksekusi ini dilakukan setelah melalui proses hukum panjang dan sempat tertunda dua kali akibat penolakan warga.

Sejak pagi, ribuan massa menolak eksekusi dan memblokade akses menuju lokasi. Mereka menempati sejumlah titik strategis untuk menghalangi petugas masuk ke area obyek sengketa. Situasi sempat memanas. Ketegangan antara warga dan aparat keamanan tak terhindarkan. Namun, personel gabungan dari PN Sidoarjo, TNI, Polresta Sidoarjo, dan Brimob Polda Jatim yang diterjunkan mampu mengendalikan keadaan.

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan PT Kejayan Mas, atas sengketa lahan dengan Elok Wahiba dan Miftahur Roiyan. Perusahaan itu dinyatakan sebagai

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

Data Penerima Pupuk Subsidi Desa Genengadal Diduga Dimanipulasi



Contoh pupuk bersubsidi (Foto: ist)

GROBOGAN, BN – Dugaan manipulasi data dan penyelewengan pupuk bersubsidi mencuat di Dusun Kedung, Desa Genengadal, Kecamatan Toroh,Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya, seorang Warga berinisial DK (45) mengaku data dirinya dipakai dan terdaftar dalam e-RDCK sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok untuk memperoleh pupuk bersubsidi secara ilegal.

Menurut kesaksian DK, pada Jumat (16/5/2025), ia tidak pernah menerima pupuk bersubsidi meski namanya tercatat dalam e-RDCK. Bahkan, sebenarnya dari tahun 2018 hingga kini tahun 2025 sekalipun tak pernah mengajukan persyaratan keabsahan dalam dokumen RDKK.

"Saya belum pernah sekalipun mengajukan dan menyerahkan persyaratan untuk keabsahan dokumen RDKK, tapi mengapa kok data diri saya masuk dalam dokumen e-RDCK untuk Kelompok Tani Makmur di Dusun Kedung, Desa Genengadal. Bahkan tidak pernah melihat atau memegang kartu e-RDCK meskipun data saya tercatat aktif setiap bulan," ungkapnya.

Selain itu, DK menjelaskan bahwa ia tidak pernah mempunyai lahan pertanian dan perkebunan sebagai salah satu syarat sah untuk pengajuan data RDKK. Namun, ia merasa heran kenapa data dirinya terverifikasi dan tervalidasi di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan secara sah dalam data penerima RDKK.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Ikan Lele 2/Ci14 Bluru Permai, Bluru Kidul, Sidoarjo atau Hubungi Bos EDY (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com

PN Sidoarjo Nyatakan PT Chalidana Wanprestasi, Pasutri di Perum Safira Juanda Menang Gugatan



Pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva Sulistyorini, dengan Kuasa Hukumnya Rohmad Amrulloh (kanan). (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN – Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo memutuskan perkara perdata Nomor: 275/Pdt.G/2024/PN.Sda dengan menyatakan bahwa PT. Chalidana Inti Cahaya (CIC) selaku penggugat sekaligus tergugat dalam rekonsensi, terbukti melakukan wanprestasi. Putusan dibacakan, pada 27 Mei 2025, lalu.

Kuasa hukum pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva Sulistyorini, Rohmad Amrulloh, menyampaikan bahwa gugatan rekonsensi yang mereka ajukan dikabulkan majelis hakim. “Pada saat kami digugat oleh PT CIC, kita mengajukan rekonsensi yang dikabulkan oleh majelis. Tergugat PT CIC dinyatakan wanprestasi. Yang kedua, kita sebagai penggugat rekonsensi dihukum membayar kelebihan tanah,” lanjutnya. Yang ketiga, putusan PN Sidoarjo adalah sebagai dasar perali-

han atas objek yang menjadi gugatan,” kata Rohmad Amrulloh, kepada Bidik Nasional, Senin (16/6/2025).

Dalam amar putusan, majelis hakim menghukum Didik-Eva selaku penggugat rekonsensi untuk membayar kelebihan tanah seluas ±18 meter persegi kepada PT CIC. Nilai kelebihan tanah tersebut ditetapkan sebesar Rp1.500.000 per meter, sehingga totalnya mencapai Rp27.000.000.

Selain itu, majelis hakim juga menghukum PT CIC selaku tergugat rekonsensi untuk menerima pembayaran atas objek kelebihan tanah tersebut. “Putusan ini juga menyatakan sebagai dasar peralihan terhadap objek kelebihan tanah seluas ±18 meter persegi tersebut,” tambah Rohmad.

Ia menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik putusan ini dan menganggap sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak, yakni pihak user (pembeli rumah) dan pengembang (developer). “Kami meyakini bahwa putusan tersebut adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak, yakni kami selaku user dan PT CIC seba-

gai developer,” ujar Rohmad.

Ia juga mengapresiasi kerja hakim yang dianggap telah memutuskan perkara berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan secara adil dan proporsional. “Putusan ini membuat kami tetap percaya pada lembaga peradilan, khususnya di PN Sidoarjo. Para hakim betul-betul memeriksa perkara berdasarkan bukti dan menjunjung tinggi rasa keadilan serta kepastian hukum,” tegasnya.

Namun, ia juga mengungkapkan bahwa PT Chalidana telah mengajukan banding pada 5 Juni 2025. Pihaknya pun langsung menanggapi langkah tersebut dengan mengajukan kontra memori banding melalui sistem e-Court. “Kami berharap hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding mengacu pada rasa keadilan dan pertimbangan hukum yang sama dengan majelis hakim tingkat pertama. Putusan PN Sidoarjo ini sejatinya sudah ‘win-win solution’, seharusnya PT Chalidana tidak perlu banding. Tapi karena mereka tetap banding, ya kami hadapi,” kata Rohmad.

Sementara itu, Eva, pihak yang turut menjadi tergugat rekonsensi dalam perkara ini, mengaku senang dengan

putusan yang berpihak padanya. Ia menyebut sebelumnya pihak developer sempat meminta bayaran sangat tinggi tanpa kejelasan. “Sebelum masuk somasi, kami disuruh membayar Rp650 juta untuk satu unit rumah. Padahal yang mengukur dan membangun itu bukan kami, tapi pihak pengembang,” ujar Eva.

Di akhir pernyataannya, Rohmad Amrulloh mengajak masyarakat untuk tidak ragu menempuh jalur hukum jika mengalami ketidakadilan. “Kami sampaikan kepada masyarakat umum agar tidak takut dan tidak ragu untuk mengajukan perkara melalui jalur hukum, yakni di pengadilan. Karena disanalah benteng keadilan masyarakat akan dilindungi,” pungkasnya.

Dikonfirmasi kuasa hukum PT Chalidana Inti Cahaya, Siti Hamidah, enggan memberikan statemen terhadap BidikNasional. Namun, sebelumnya menegaskan bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan SOP perusahaan, bahkan pihaknya sudah memberikan diskon. “Kami sebenarnya sudah memberikan diskon, namun seiring berjalannya waktu tidak ketemu masalah harga,” ujarnya singkat. (Teddy Syah Roni)

Rapat Paripurna DPRD Kab Sidoarjo Jawaban Bupati Tentang Pandangan Umum Fraksi - Fraksi



Rapat paripurna DPRD kabupaten Sidoarjo di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo (17/6). (Foto: ist)

Keputusan KUA-PPAS Sah Meski Dihadiri 15 Anggota DPRD Sidoarjo tidak berhenti membuat kehebohan. Permintaan maaf Bupati Subandi dalam rapat paripurna, kemarin dianggap tidak tulus dan sebagian besar anggota memilih WO Sehingga paripurna dilanjutkan dengan hanya 15 anggota saja.

Mungkin lengah atau tanpa disadari, bahwa ada paripurna pengambilan keputusan dalam paripurna ke-2, yakni Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS tahun 2025. Akhirnya kedua rancangan itu disahkan dalam rapat paripurna oleh 15 anggota saja. Saya tidak paham apakah sebuah keputusan sepenting itu bisa ditempuh secara paripurna dengan 15 anggota. Sementara dalam Tatib DPRD disebutkan keputusan dapat diambil bila anggota yang hadir memenuhi syarat atau kourum (25+1)

Kenapa keputusan kemarin bisa diambil? Karena sebagian besar anggota memilih walk out duluan pada paripurna ke-1. Padahal ada lanjutan rapat paripurna ke-2. Bagaimana kelanjutan dari episode berikutnya? Kita tunggu saja, hari esok pasti lebih indah dari hari ini.

Setelah Bupati Sidoarjo menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di depan para undangan rapat paripurna, permohonan maaf terkait atas kehilafan Bupati sidoarjo dalam videonya yang lagi viral mengatakan, Bupati Bagian mengumpulkan dan mencari Uang untuk PAD kabupaten Sidoarjo, sedangkan DPRD yang bagian menghabiskan dengan menghambur- hamburkan uang APBD.

Setelah H. Subandi mengatakan permohonan maaf kepada para anggota DPRD yang hadir, sedangkan H. Abdillah Nasih ketua DPRD kabupaten Sidoarjo mengambil sikap yang sangat bijaksana yaitu dengan mengatakan kepada semua undangan rapat Paripurna DPRD kabupaten Sidoarjo.

Tlg permintaan maaf Bupati H.Subandi bisa diterima dengan hati yang sangat dalam, Ketua DPRD juga mengatakan, “tidak ada gading yang tidak retak” artinya sebaik – baik manusia tidak ada yang tidak luput dari kehilafan dan kesalahan. Sangat bijak sekali yang di katakan oleh ketua DPRD kabupaten sidoarjo tersebut. (yah)

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Beri Penghargaan Anggota Berprestasi



Para anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapat penghargaan foto bersama Kapolres AKBP Wahyu Hidayat. (rosi)

wujud apresiasi pimpinan terhadap dedikasi dan pencapaian luar biasa yang ditunjukkan oleh para personel dalam menjalankan tugasnya. Turut hadir dalam acara tersebut para Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek di jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Dalam amanatnya, AKBP Wahyu Hidayat menyatakan bahwa pemberian penghargaan ini adalah bentuk pengakuan institusi Polri terhadap anggota yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi. “Pemberian penghargaan kepada anggota Polri merupakan suatu wujud penghargaan dari pimpinan kepada anggota atas prestasi yang telah dicapai,” ujarnya.

Kapolres berharap, dengan adanya kegiatan ini, dapat menjadi pemantik semangat dan motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anggota yang lain untuk selalu meningkatkan semangat yang lebih baik lagi, semakin baik dalam melaksanakan tugas,” tambah AKBP Wahyu Hidayat.

Prosesi acara diawali dengan pembacaan keputusan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan secara langsung oleh Kapolres kepada para penerima.

Salah satu penerima penghargaan, Kapolsek Kenjeran Kopol Yuyus Adiastanto, mendapat apresiasi khusus atas keberhasilannya dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Program penanaman jagung seluas 1 hektar yang digagasnya berhasil memberikan hasil panen yang signifikan, yakni sebanyak 6.560 kilogram. Prestasi ini dinilai sejalan dan mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang salah satunya berfokus pada kemandirian pangan nasional.

Kemudian disusul Ipda Mochammad Mustofah, Kanit Jatanras juga turut menerima

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Sidang Perdagangan Ginjal, Pemodal Harus Dipidana

SIDOARJO, BN – Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana perdagangan organ ginjal ke India, Kamis (19/6/2025). Dalam kasus ini, pasangan suami istri asal Sidoarjo didudukkan sebagai terdakwa. Sidang yang berlangsung terbuka untuk umum itu menghadirkan dua saksi ahli dari bidang hukum pidana. Mereka memberikan keterangan guna memperjelas aspek yuridis dalam perkara yang menjerat kedua terdakwa. Saksi ahli pertama yang dihardirkan oleh tim penasihat hukum terdakwa adalah Bastian Nugroho, seorang akademisi dari Universitas Merdeka (Unmer) Surabaya.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Bastian menyatakan bahwa transaksi jual beli organ tubuh manusia harus dilihat dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, jika dilakukan di luar ketentuan hukum, maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan ilegal. “Berbicara mengenai transaksi, maka itu berbicara mengenai perdagangan. Dan setiap perdagangan harus dilihat apakah melanggar hukum atau tidak,” ujar Bastian.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk dalam konteks jual beli organ tubuh.

Bastian juga menyoroti aspek kesepakatan dalam transaksi organ tubuh. Menurutnya, apabila ada persetujuan antara penjual dan pembeli, maka keduanya bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. “Eksploitasi itu adalah bagian dari perdagangan. Jika ada kesepakatan, maka penjual dan pembeli dapat juga dikenai sanksi pidana,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan ketentuan Pasal 18 dalam Undang-Undang TPPO yang memberikan pengecualian



Saksi ahli lainnya, Yusron Marzuki, akademisi dari Universitas Narotama Surabaya. (Teddy)

menyampaikan bahwa pihak yang memodali transaksi atau memfasilitasi proses jual beli ginjal juga dapat dikenai pidana. Hal itu merujuk pada Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. “Pemodal yang membantu kelancaran jual beli ginjal bisa juga dikenai sanksi berdasarkan Pasal 55 KUHP,” tegasnya.

Sementara itu, dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), turut dihadirkan saksi ahli lainnya, yakni Yusron Marzuki, akademisi dari Universitas Narotama Surabaya. Ia memberikan pandangan hukum dari sisi struktur delik dalam UU TPPO.

Menurut Yusron, dalam konteks delik TPPO, cukup dengan adanya tujuan dan maksud (mens rea), maka unsur perbuatan pidananya telah terpenuhi, bahkan sebelum tindakan benar-benar terjadi. “Delik dalam TPPO bisa bersifat formil dan culva. Kalau formil ada unsur kesengajaan, sedangkan culva bisa karena kelalaian. Dalam kasus ini, unsur kesengajaan sudah tampak,” terang Yusron.

Ia juga menegaskan bahwa meski perbuatan terhenti, selama bukan karena kehendak pelaku sendiri, maka tetap bisa dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana perdagangan orang. “Jika niat sudah ada, dan perbuatan dihentikan oleh pihak lain, bukan kehendak sendiri, maka masih bisa masuk dalam kategori percobaan TPPO,” paparnya.

apabila korban terbukti mengalami pemaksaan. Namun, ia mengingatkan bahwa pasal tersebut tidak bisa digunakan tanpa pembuktian yang memadai. “Harus ada bukti eksplisit bahwa korban dipaksa. Kalau tidak ada unsur pemaksaan, maka pasal pengecualian tidak bisa diterapkan,” tambahnya.

Selain itu, Bastian juga menambahkan bahwa pasal yang memodali transaksi atau memfasilitasi proses jual beli ginjal juga dapat dikenai pidana. Hal itu merujuk pada Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. “Pemodal yang membantu kelancaran jual beli ginjal bisa juga dikenai sanksi berdasarkan Pasal 55 KUHP,” tegasnya.

Sementara itu, dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), turut dihadirkan saksi ahli lainnya, yakni Yusron Marzuki, akademisi dari Universitas Narotama Surabaya. Ia memberikan pandangan hukum dari sisi struktur delik dalam UU TPPO. Menurut Yusron, dalam konteks delik TPPO, cukup dengan adanya tujuan dan maksud (mens rea), maka unsur perbuatan pidananya telah terpenuhi, bahkan sebelum tindakan benar-benar terjadi. “Delik dalam TPPO bisa bersifat formil dan culva. Kalau formil ada unsur kesengajaan, sedangkan culva bisa karena kelalaian. Dalam kasus ini, unsur kesengajaan sudah tampak,” terang Yusron. Ia juga menegaskan bahwa meski perbuatan terhenti, selama bukan karena kehendak pelaku sendiri, maka tetap bisa dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana perdagangan orang. “Jika niat sudah ada, dan perbuatan dihentikan oleh pihak lain, bukan kehendak sendiri, maka masih bisa masuk dalam kategori percobaan TPPO,” paparnya.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK

NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. SIDOARJO: Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM, Subkan Arif. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Holillurohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabirol), Devi Setyorini. NGANJUK : Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. KEDIRI : Nyoto Dharmawan. TULUNGAGUNG/TRENGGALEK : Nik Atin. MADIUN: Basuki. NGAWI : Leo Lunardi T. MAGETAN : Ashar AR. PONOROGO : Andhy Wijaya. LAMONGAN : Syaiful Anam, Sulistiowati, Arif Mustofa, Joko Santoso. BOJONEGORO : Priyanto. MALANG RAYA : Asep Sujana. SUMEDANG: Emawan Hidayat. SUBANG : Tohir (Kabirol), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. INDRAMAYU : Candra Shema Restullah (Kabirol), Ragil Pangestu. DEPOK : Harahap (Kabirol), Fajar. BEKASI : Abdul Rachman. KUNINGAN: Edwar Panata Muda. PURWAKARTA: Anthon Pontoh, Endin. BOGOR : Liswandi (Kabirol), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. JAKARTA/BANTEN : Ayom Cahyono (Kabirol), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI SELATAN : SOPPENG/MAJO : Anwar Paturusi (Kabirol). PINRANG: Moh Sabir (Kabirol). BONE : Eddy Suspi AB. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO: Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabirol), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Riffly Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA: Effendi (Kabirol). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabirol). KEPRI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN: Handoko KEP NATUNA: Amir Hamzah. RIAU: Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Sirlani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurahman. PAGAR ALAM : Marleo Tanjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : MAzhary MY, OKU TIMUR : Nells Sri Wahyuni. OKI : Nurlis Oktari. SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN: Muhammad Syafei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabirol). PAKPAK BHARAT : Tennang Tumangger (Kabirol), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P. Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. NIAS UTARA : Hadirat Syukur Harefa. NIAS BARAT : Odaligo Zai. TAPANULI SELATAN : Amir Hamzah Nasution SUMATERA BARAT : PASAMAN: Suryadarma (Kabirol), Refdinal. LAMPUNG : WAY KANAN : Arye M Jahri. LAMPUNG TIMUR : Nuhyin, Mueshin, Antoni. LAMPUNG UTARA : Eka Saputra (Kabirol), Triyutika Sari LAMPUNG SELATAN: Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. LAMPUNG BARAT / PESISIR BARAT : M. Taufik TULANG BAWANG/UTUNG LANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. PRINGSEWU : Iskandar. B. BANDAR LAMPUNG : Suhartono Hariwibowo. TANGGAMUS : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabirol), Simson Sitepu. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bancia (Kabirol), Imran Cibro. ACEH SINGKIL :Roni Syehrani (Kabirol), Nurhalimah. BIREUM : Hendra S. BANGKA BELITUNG: Agusman Sirait (Kabirol), Tamrin. JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT: Joni Efendi. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM : Hidayatul Aini (Kabirol). PAPUA : Junjungan Silalahi. LAYOUT/IT Nur Hayati PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN: Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO: 0220105231819. NPWP: 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lela 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. BANK: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasional.com.Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Penganal, Namanya Tercantumkan Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

Alun-alun Direvitalisasi, Masyarakat Sidoarjo Bakal Miliki Tempat Hiburan dan Icon Baru



Kepala Dinas DLHK Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amiq bersama AJS dan LSM Seven Gab. (Foto: ist)

SIDOARJO, BN – Alun – alun Sidoarjo jadi tempat ramah anak. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercantik diri. Di Tahun 2025, kota UMKM ini siap memiliki icon baru dengan merevitalisasi Alun-alun yang akan menjadi tempat ternyaman bagi seluruh masyarakat Sidoarjo khususnya anak-anak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sido-

arjo, Moch Bahrul Amiq mengungkapkan sudah satu bulan ini, proses revitalisasi dilakukan dan ditargetkan akan selesai dalam tujuh (7) bulan mendatang.

“Semoga selesai sesuai dengan perencanaan dan akhir tahun bisa menjadi kado terindah bagi masyarakat Sidoarjo,” kata Amiq ditemui di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Siwalan Panji

Sidoarjo, Rabu (18/05/2025) sore.

Amiq menjelaskan pihaknya sangat berharap masyarakat atau kelompok masyarakat bisa menjadi bagian dinamika untuk melakukan kontrol sosial bila dalam proses pembangunan revitalisasi ada hal-hal yang kurang pas.

“Kelompok masyarakat atau Seven Gab bisa membantu kontrol sosial dan bisa memberikan masukan dan saran kepada kami,” ungkapnya.

Amiq kembali menegaskan dari awal pihaknya sudah mempublikasikan bahwa revitalisasi Alun-alun ini merupakan hajat bareng dan sudah melalui proses yang cukup panjang. “Diharapkan alun-alun ini akan menjadi icon baru Sidoarjo yang kuat,” tegasnya.

Sebagai icon baru Sidoarjo, sambung Amiq, sudah diawali dengan wajah teras

yang bagus yaitu Monumen Jayandaru dan akan dilakukan revitalisasi hingga ke belakang. Termasuk dengan pembangunan pedestrian yang lebar sebagai jogging track yang nyaman bagi masyarakat. Serta untuk anak-anak mendapatkan atensi khusus bukan sebagai wahana bermain tetapi sekaligus wahana edukasi.

Ditempat yang sama, Ketua LSM Komunitas nasional (KOMNAS) sekaligus Sekretaris Persatuan LSM Seven Gab, Suryanto mengungkapkan pada dasarnya kami ingin dengan pembangunan Alun-alun Sidoarjo akan memperindah Kabupaten Sidoarjo. Kami akan tetap melakukan kontrol sosial yang profesional. “Tentunya kami sangat berharap dengan revitalisasi Alun-alun ini bisa menjadi icon baru yang juga tempat yang nyaman bagi masyarakat Sidoarjo,” tandasnya. (yah)

Tunjang Perekonomian Desa, Pemdes Bagi Rabat Jalan Lingkungan Gunakan DDS TA 2025

MADIUN, BN –Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan wilayah pedesaan. Jalan desa yang baik dan terawat adalah kunci untuk meningkatkan konektivitas antar desa, lingkungan dan menghubungkan desa dengan pusat pusat perekonomian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Mulyanto selaku Kades Bagi.

Lebih lanjut dikatakan, pada tahun anggaran 2025 ini Desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun melaksanakan kegiatan rabat jalan lingkungan di lokasi RT. 18. RW. 03 Dusun Gedangan, sumber anggaran berasal dari DDS (Dana Desa) TA. 2025 sebesar Rp. 39.618.100.

Di lokasi lain, Prasetyo selaku tim pelaksana kegiatan (TPK) desa, menambahkan, kegiatan rabat jalan di dusun



Pemdes Bagi rabat jalan lingkungan di RT. 18. RW. 03 Dusun Gedangan, sumber anggaran berasal dari DDS (Dana Desa) TA. 2025 (Bas)

Joko, salah satu warga setempat mengatakan, dengan adanya kegiatan rabat jalan lingkungan ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena meningkatkan aksesibilitas, dengan jalan yang baik pen dukuk desa dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan penting serta meningkatkan interaksi sosial kehidupan di desa, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan,” pungkasnya. (Bas)

Gedangan RT. 18. RW. 03 ini dengan volume pekerjaan 100 x 3 x 0,13 m, melenai anggaran sebesar Rp. 39.618.100 yang berasal dari Dana Desa (DDS) TA. 2025, pelaksanaan secara swakelola oleh TPK desa. Sedang tenaga kerja dari warga lingkungan setempat secara padat karya, dan pekerjaan saat ini sudah selesai seratus persen.

Pemdes Gilang Bangun Jalan Beton Senilai Rp 58 Juta



Pemerintah Desa Gilang Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo membangun jalan beton sebagai jalan tembus dari wilayah Dusun Gilang Selatan nyambung ke jalan Dusun Sambisari, Desa Sambibulu. (Suwoto)

SIDOARJO, BN– Pemerintah Desa Gilang Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo membangun jalan beton sebagai jalan tembus dari wilayah Dusun Gilang Selatan nyambung ke jalan Dusun Sambisari, Desa Sambibulu. Pembangunan jalan alternatif seluas kurang lebih 31,5 M2 tersebut sudah dimulai sejak tanggal 3 Juni 2025 lalu hingga waktu 10

hari ke depan.

Saat berita ini ditulis (17Juni 2025), jalan beton yang dianggarkan dana senilai Rp.58.000.000 (termasuk pajak).

Sementara waktu jalan tersebut sudah boleh dilewati hanya kendaraan roda dua. Selanjutnya jalan rabat cor beton yang menggunakan Tanah Kas Desa (TKD) berlokasi di RT 31 RW 08

Dusun Gilang Selatan.

Desa Gilang ini hanya boleh dilewati kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 mobil pribadi dan pick up bertonase tidak melebihi kapasitas. Sedangkan kendaraan Truk engkel serta sejenisnya dilarang melewati jalan dimaksud.

Plh. Kepala Desa Gilang, H Bakhruddin Alim,S.Pd.I, sehubungan penggunaan jalan tersebut, mengeluarkan surat edaran peraturan desa (Perdes) perihal peraturan pengguna jalan alternatif itu. Surat edaran tertanggal 17 Juni 2025 bersifat penting perihal pemberitahuan pembatasan kendaraan ini, ditujukan kepada ketua RW 01 sampai dengan RW 08 se-Desa Gilang.

“Berdasarkan hasil musyawarah di lingkungan RW

08, kami Pemerintah Desa Gilang menghimbau kepada ketua RT dan ketua RW untuk memberitahukan kepada warganya agar mematuhi Peraturan Desa terkait pengguna/fungsi jalan tersebut demi menjaga kondisi jalan dan keselamatan,” tulis Plh.Kades Gilang, H.Bakhruddin Alim dalam surat edarannya.

Ketua RT 30 RW 08 Wisma Gilang Permai, Suyadi membenarkan bahwa surat edaran Plh Kades Gilang tersebut sudah melalui musyawarah Ketua RT dan Ketua RW. “Karena waktu itu sudah dirapatkan sama Pak RW dan Pak RT, jadi dibuatkan surat edaran perdes bahwa yang boleh lewat mobil kecil dan motor. Truk engkel dan sejenisnya tidak boleh,” jelasnya. (suwoto)

Tim UNESCO GLOBAL GEOPARK Kunjungi Desa Jono, Kades: Menuju Desa Wisata



Tempat penemuan fosil yang dikunjungi tim Geopark di hutan KRPH sampang di Desa Jono. (Pri)

BOJONEGORO, BN – Desa Jono adalah katagori desa seni dan budaya. Ini ciri khas Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Kamis 12/6/2025. Desa seni dan budaya dapat kunjungan tim validasi UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGGP). Tim penilai mengunjungi pengrajin batik lokal khas Kabupaten Bojonegoro milik Paini atau

Makni yang berada di desa Jono.

Tim validasi melakukan penilaian dan mengunjungi penemuan sebuah benda bersejarah fosil ikan Hiu di KRPH Sampang Buntalan.Tim Verifikasi dan Validasi yang dipimpin dan diketuai Mirawati Sudjono menuturkan bahwa Bojonegoro mempunyai banyak prasejarah peninggalan benda benda bersejarah. Seperti halnya Fosil yang usianya mencapai Ratusan tahun bahkan jutaan tahun.

“Fosil ikan hiu yang ditemukan pegiat geologi Supangat purnawirawan angkatan darat ini pada tahun 2013 umurnya diperkirakan sudah 112juta tahun yang lalu melalui penyusutan air lautan ratusan juta tahun, sehingga menjadi daratan menyebabkan banyak ikan hiu mati tinggal tulang belulangnyaserta giginyamembatu dan menjadi fosil,” ujarnya.

Sementara, Kepala Desa Jono, Hj. Henis Meindrawati kepada Awak media mengatakan, dengan adanya budaya seni batik dan penemuan budaya situs,yang di temukan di desa Jono, ia berharap bisa menjadi kemajuan desa menuju wisata kedepannya. “Sebagai ikon desa untuk itu, proses menjadi desa wisata perlu dukungan berbagai pihak terutama pemerintah kabupaten daerah Bojonegoro,” harapnya.

Kegiatan kunjungan, penilaian, validasi serta verifikasi dan validasi menuju UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGGP) disaksikan dan diikuti oleh siswa sekolah dasar dan sekolah menengah termasuk mahasiswa dari UNIGORO.

Hadir FORFIMCAM Kecamatan Temayang dan Aktifis GEOPARK Bojonegoro, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Pariwisata, Perhutani KPH Bojonegoro, guru sekolah dasar dan menengah. (pri)

Polresta Banyuwangi Raih Penghargaan Pelayanan Prima Kategori A Dari Kapolri



Polresta Banyuwangi meraih penghargaan Pelayanan Prima (Kategori A) Kapolri atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 (ist)

BANYUWANGI, BN – Polresta Banyuwangi meraih penghargaan Pelayanan Prima (Kategori A) dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. Kamis (19/6/2025). Penghargaan tersebut merupakan hasil dari PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) yang dilakukan secara nasional.

Penghargaan ini menempatkan Polresta Banyuwangi sebagai salah satu satuan kerja kepolisian dengan standar layanan terbaik di lingkungan Polri. Kapolresta Banyuwangi, Kom-

bes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas dedikasi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

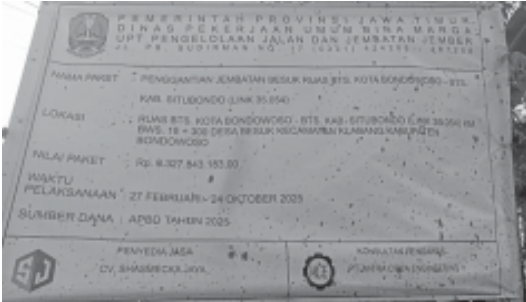
Namun demikian, Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk terus berbenah. “Tolak ukur pelayanan prima adalah sejauh mana masyarakat merasa puas, merasakan manfaat langsung, dan mendapat kemudahan dalam setiap urusan. Ini harus menjadi komitmen bersama,” ujar Kapolresta.

Lebih lanjut, Kombes Pol. Rama Santama Putra menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan secara konsisten dan humanis, sejalan dengan semangat Polri yang Presisi.

Capaian ini menjadi bukti bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang adaptif dan akuntabel. Ke depan, Polresta Banyuwangi akan terus berinovasi dalam memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas.

(Dj/Swd)

Antrian Kendaraan di Bondowoso Mengular Akibat Proyek Jembatan Besuk Rp 6,3 M



Tampak antrian kendaraan akibat proyek jembatan Besuk. (Agung Ch)

BONDOWOSO, BN – Tersendatnya arus lalu lintas cukup signifikan, disinyalir terjadi setiap hari di jalan raya penghubung antar Kabupaten Situbondo-Bondowoso akibat proyek penggantian jembatan yang saat ini dikerjakan oleh CV Shasmecka Jaya. Rabu, (18/6/2025).

Dampak antrian kendaraan yang berlokasi di Desa Besuk, Kecamatan Klabang, itu terlihat mengular. Sebab, kegiatan yang menghabiskan anggaran senilai Rp 6,3 miliar tersebut menggunakan sistem buka tutup dengan satu jalur secara bergantian.

SM, seorang pengendara motor, menyampaikan kepada awak media bahwa tersendatnya lalu lalang pengendara mulai terjadi sejak pagi hari dan berlangsung hingga sore. “Banyak dari mereka terjebak dalam antrian, yang menyebabkan ketidaknyamanan,” ungkapnya. Menurut SM, meskipun pihak penyedia jasa telah memasang rambu-rambu peringatan dan pengalihan jalan, namun nampaknya tidak cukup untuk menghindari tumpukan kendaraan.

Karenanya, SM berharap agar kegiatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dapat segera diselesaikan dengan tepat waktu. Itu dilakukan, untuk menghindari antrian yang berkepanjangan. Sekedar diketahui, bahwa proyek pembangunan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember yang diambilkan dari APBD tahun 2025 tersebut, dimonitoring langsung oleh konsultan pengawas PT Mitra Cipta Engineering (MCE). (Agung Ch)

KEHILANGAN STNKB

Telah hilang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Yamaha Vega, Tahun 2005, Warna Biru, Nopol : W-3460-NAE, Noka : MH345T1105K878855, Nosin : 4ST1245519 An Supardi. Hilang di wilayah hukum Polsekta Sidoarjo Selasa 20 Mei 2025 sekitar pukul 10.40 WIB. Bagi yang menemukan mohon hubungi Bpk Sutomo Dusun Glatik RT 03 RW 01, Kel/Desa Klampisan, Kec Kandangan, Kab Kediri, HP: 081332434910

KEHILANGAN SIM

Telah hilang Surat Ijin Mengemudi (SIM) C, atas nama Sutomo Dusun Glatik RT 03 RW 01, Kel/Desa Klampisan, Kec Kandangan, Kab Kediri. Hilang di wilayah hukum Polsekta Sidoarjo Selasa 20 Mei 2025 sekitar pukul 10.40 WIB. Bagi yang menemukan mohon hubungi Bpk Sutomo HP: 081332434910

Gubernur Khofifah Gelontorkan Bansos Rp 6,37 M di Kabupaten Pamekasan

PAMEKASAN, BN- Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa menggelontorkan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 6,37 Miliar untuk warga pra sejahtera di kabupaten Pamekasan. Adapun bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Jatim Restu Novi Widiani yang berlangsung di pendopo Agung Ronggosukowati Pamekasan, Minggu 15/6/2025

Dalam sambutannya bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman SH, Msi menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemprov Jatim yang telah memberikan perhatian khusus terhadap daerahnya. Sedangkan bantuan itu menjadi penyemangat pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. “Saya atas nama pemerintah kabupaten Pamekasan dan masyarakat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya Ibu gubernur bersama rombongan di tempat kami. Semoga bantuan ini menjadi motivasi kita semua untuk meningkatkan lintas sektor mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Dikatakannya,selain bantuan untuk masyarakat pra



Gubernur Khofifah secara simbolis menggelontorkan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 6,37 Miliar untuk warga pra sejahtera di Kabupaten Pamekasan. (ist)

sejahtera tersebut Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan khusus melalui program Jatim Puspa yang bertujuan untuk memberdayakan usaha perempuan, khususnya untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, Pemprov Jatim juga menggelontorkan bantuan kepada pemerintah desa untuk pemberdayaan Badan Usaha Milik desa (Bumdes). Program tersebut akan menjadi pelecut semangat dalam meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di daerahnya. “Dengan adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini,saya berharap terhadap kepala desa semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan desanya bersama masyarakat sesuai dengan potensi desa yang dimilikinya,” harapnya.

Perlu diketahui adapun bantuan sosial yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa pada kesempatan itu berupa Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Lansia, (PKH Plus), KIP Putri Jawara, bantuan pendamping PKH Plus, bantuan program pemberdayaan Bumdes,Jatim Puspa serta tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). (Kholis)

Bupati Kholilurrahman Launching Program Layanan Paduka di Kecamatan Waru

PAMEKASAN, BN - Bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman,SH,Msi didampingi wakil bupati Pamekasan Sukriyanto bersama sekretaris daerah (Sekda) Masrukin S.sos, Msi dan Plt Kepala Disdukcapil Drs Saudi Rahman serta kepala OPD se- kabupaten Pamekasan melaunching program Pelayanan Administrasi Kependudukan Kecamatan (PADUKA) yang bertempat di kantor kecamatan Waru kabupaten Pamekasan, Selasa 17/6/2025.

Sedangkan program PADUKA tersebut merupakan salah satu program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Pamekasan Kholilurrahman - Sukriyanto yang di prakarsai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Pamekasan.

Menurut bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman, SH,Msi mengatakan, dokumen kependudukan meru-

upakan salah satu hak warga negara yang wajib difasilitasi oleh negara. Hal itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap rakyatnya dalam dokumen yang sah. Sebab dokumen-dokumen kependudukan kini sudah menjadi dasar dari seliruh pelayanan publik.seperti halnya,anak kita mau masuk sekolah, tentunya butuh akte kelahiran KK, dan KIA.

Kemudian juga ketika kita butuh layanan kesehatan seperti BPJS,maka pasti butuh KTP elektronik, KK maupun dokumen kependudukan lainnya. Oleh itu dalam program 100 hari kerja pihaknya berkomitmen untuk lebih meningkatkan dan memudahkan pelayanan kependudukan bagi masyarakat Pamekasan, khususnya masyarakat wilayah utara dengan program PADUKA tersebut.

“Sebagai warga negara hak - hak kita dilindungi oleh negara. Ketika lahir kita



Bupati Kholilurrahman saat Launching Program Layanan Paduka di Kecamatan Waru.

memperoleh akte kelahiran, kemudian seiring bertambahnya usia dibuatkan Kartu Identitas Anak (KIA),KTP bahkan setelah meninggalpun kita dibuatkan dokumen kematian,” ungkapnya.

Kholil juga menambahkan peluncuran program PADUKA tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kabupaten bagi masyarakat wilayah utara untuk mengurus dokumen kependudukan

dengan mudah,cepat dan efisien. Sebab, jarak tempuh mereka ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Mall Pelayanan Publik (MPP) Pamekasan cukup jauh.sehingga butuh waktu dan tenaga serta biaya. Oleh karena itu perlu dilakukan oleh pemkab Pamekasan untuk mempermudah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah utara tersebut. (kholis)

Bupati Kunjungi Rutan Kelas IIB Sumenep

SUMENEP, BN - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sumenep dikunjungi Kepala Daerah Kabupaten Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo,SH, MSi dalam kunjungannya disambut penghargaan oleh Kepala lapas dan jajarannya. Dalam hal itu bisa memberikan semangat kepada semua personil lembaga Lapas agar bekerja sesuai aturan Kemenhumham RI

Heri Sutriadi Kepala Rutan Kelas IIB Sumenep dalam pertemuan dengan Bupati Sumenep, memberikan hasil kenerja didalam tahanan dengan berbagai program pembinaan yang sudah dilakukan. Yaitu dari pelatihan keterampilan kerja, pembinaan rohani, hingga kegiatan sosial sebagai bagian dari upaya membentuk karakter warga binaan. Semua program itu ditujukan untuk membekali para narapidana agar kelak mampu kembali ke tengah-tengah masyarakat bisa bekerja secara mandiri, berakhlak mulia juga membantu masyarakat yang membutuhkan.



Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo,SH,MSi saat mengunjungi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sumenep.

Atas pemberitahuan kepala lapas diatas kepada Bupati Fauzi, maka beliau mengapresiasi inisiatif tersebut dengan tidak mengurangi kejenuhan selalu banyak berkarya orang – orang yang terjerat hukuman di lapas Sumenep. “Pembinaan untuk masa depan pribadi dan keluarganya dalam hal untuk mengurangi kriminalitas dan tindakan –tindakan yang dilarang oleh agama dan pemerintah, sehingga warga binaan harus memiliki potensi bisa berkontisbusi tepat sasaran,” kata Bupati.

Diakhir pertemuan dalam ramah tamah suasana penuh kesejukan, keakraban dan penuh kekeluargaan. Harapan bupati untuk selanjutnya jangan putus komunikasi dan selalu merancang program kolaboratif yang terukur demi mendorong kemajuan sistem kemasyarakatan dan pembangunan dengan adaptasi perkembangan jaman,agar tetap tidak ketinggalan.

(yus)

Bereliminasi Ciptakan Iklim Kompetitif Yang Konstruktif Bersama Insan Pendidik Penuh Dedikasi



Kasek UPT SD Negeri Driyorejo. (SA)

GRESIK, BN – Pepatah Jawa mengatakan “Putie Beras Gak Teko Deplokan Tapi Teko Gesekan Sak Konco Kancane”. Berlandaskan filosofi itulah maka iklim kompetitif sengaja penulis ciptakan, sekaligus menjadi misi besar dalam mengejawantahkan peran dan fungsi sebagai personal pers media, berekspektasi guna dapat memenuhi tuntutan perkembangan era.

Merebaknya lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kontrol sosial, serta telah menjadi kepastian pula bahwa arus penetrasi personalitanya tumpeklek membarengi, hingga mengakibatkan lajunya roda penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai pemerintahannya, dalam catatan dan pengamatan penulis perlu perhatian khusus.

Menanggapi akan hal itu, pada kesempatan ini penulis yang berprofesi sebagai awak media Cetak & Online Bidik Nasional akan menuangkan segala apa yang telah diperoleh dilapangan saat dan dalam menjalankan tugas-tugas pokok jurnalistik beserta kewartawanannya. Bertujuan memperkaya referensi khasanah berbingkai kebebasan berekspresi, sebagai cara dalam turut berkontribusi sosial, yakin dalam berpikir objektif, rasional yang cerdas dalam berakurasi, presisi dalam berpijak seberapa penting dan prioritasnya neraca problematika.

Berbekal sekelumit pernyataan dari sang Kepala Sekolah (Kasek) Upt SD Negri, sebagai materi dasar dalam mengungkapkan seluruh peristiwa yang telah dialami dan dilalui oleh penulis. Berautodidak observatif, beranalisa yang elaboratif berharap mampu menggenapi jika hal itu menjadi syarat mutlak dalam mempertanggungjawabkan karya. Fundamental, elementer dan komplementer berpadu dalam resources akademik dan ilmiah entitas figur jati diri.

Ya memang setiap harinya seperti ini, silih berganti dan keluar masuk para tamu yang datang, ucap Kasek sekaligus mengawali percakapan sebagai respon jawaban pertanyaan dari awak media, seraya mempersilahkan duduk kepada kita berdua.

Proses rekayasa agar berhasil ditemui oleh seorang pejabat, via telepon menghubunginya apakah berkenan untuk menemui bila saatnya nanti kami akan berkunjung, “Berniat sowan atau bertema silaturrahmi”, tidak munafik, dengan harapan akan mendapatkan secarik tradisi yang bukan prinsipel dan fundamental. Amat-lamat terdengar suara perempuan yang mempersilakan untuk datang kekantornya, maka refleksi asumsi mengkonstruksi rasa respect dan penghormatan yang seakan berlebihan atau istimewa dari beliaunya, kepada kita para personal awak media.

Sebagai catatan, adalah prinsip bagi penulis yaitu pantang berkomunikasi liwat udara terhadap siapapun jika dirasa hal itu tidaklah sangat penting, bukan sok suci namun sangat berpengaruh pada moralitas, bisa merusak hubungan persaudaraan. Etika formal dan non formal adalah segalanya bagi penulis, mengingat bukan hanya dasar teknis dalam menjalankan tugas, etika adalah sekaligus menjadi nilai jual yang tak ternilai harganya, etika adalah parameter hubungan kedekatan dengan siapapun dan apapun.

Etika, adalah dasar dan inti dari pada tujuan penciptaan manusia. Etika atau kode etik jurnalistik adalah tidak hanya menjadi syarat dan/atau kewajiban mutlak yang harus dipatuhi pada saat menjalankan profesi sebagai wartawan atau journalist.

Bukankah sempurna akhlak adalah manifestasi dari valeu tertinggi dari butiran-butiran sila yang tertuang di dalam dasar negara kita yaitu Pancasila.

Bereliminasi edukator, seperti para guru dan kepala sekolahnya. Etika, adalah perisai dalam membentengi martabat, harga diri dan/atau integritas. Bertaruh dan bertarung kualitas akademik dan kuantitas ilmiah antar sesama penyandang profesi telah menjadi makanan sehari-hari bagi para jurnalisem.

Pejabat publik, bersumber dari latar belakang akademisinya terlingkupi kesadaran serta kewaspadaan dalam menjaga performanya, senantiasa sengaja atau dibuat-buat. Saling menjaga kehormatan dan harga diri antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, menjadi hikmah tauladan yang dapat dipetik.

Dan juga skaligus menjadi keharusan baginya yaitu para pejabat publik yakni turut bertanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungannya, khususnya dalam hal moralitas, hal itu adalah sebagai bentuk tuntutan bagi mereka yang beralamater.

Lantas bagaimana dengan kita atau mereka yang mengatasmakan dirinya sebagai person atau lembaga kontrol sosial, berbasic autodidak ?. Bila dalam catatan penulis bedasar dari aduan para mitra kerja atau sumber yang sangat terpercaya bahwa masih banyak yang menyalagunakan peran dan fungsinya dengan cara yang sangat tidak bermoral ?, berangkat dari situlah artikel ini.

Tampak pemandangan padatnya tamu yang hadir pada pagi menjelang siang, Kamis (12/6/2025), sekira pukul 9.30 WIB, dikantor Kasek Upt SD Negri wilayah Driyorejo. Bergegas dan tanggap entitas responbility tinggi dari seorang Kasek, pejabat fungsional kabupaten Gresik. Menerima serta mempersilakan seluruh yang datang dan hadir untuk duduk dan menikmati suguhan termasuk kita awak media. Seketika rasa canggung, enggan hati dan sangat segan memulai percakapan, oleh karena beliaunya meninggalkan sementara tamu yang berada dalam diruangan kerjanya hanya demi menemui kita, Maa Syaa Allah.

Konsolidasi, mengingat kali pertama awak media Bidik Nasional bertemu dengan Kasek Upt SD Negri wilayah Driyorejo, penawaran kerja sama kemitraan spontan langsung didisposisi, tentu sangatlah kooperatif. Jika sumber sikap itu adalah kedekatan komunikasi sebelumnya, maka izinkan penulis berpersepsi yang berbeda, demi untuk menyusun catatan-catatan informasi melalui kata-kata agar menjadi sebuah kalimat yang bernaras sebagai naskah artikel, tersaji dalam ruang publik dengan besar harapan dapat diterima sebagai karya intelektual jurnalistik, adalah rutinitasnya.

Motif karakter yang sangat tentu berdedikasi, dedikasi adalah kepercayaan yang diperoleh dari amanahnya kita dalam menjalankan tugas dan/ atau perkerjaan, hampir seluruh tamu yang hadir beliau sempatkan untuk menemuinya dengan serta merta mempersilakan duduk sembari menunggu.

Sudah pasti pembaca bisa membayangkan bagaimana perasaan anda jika berada diposisi kami, seakan-akan tamu prioritas. Mengarahkan percakapan dengan kesan penting dan sangat mendalam, jika tujuan dan prinsip pendidikan berkiblat pada Unesco jelas menurut penulis jika mengutip sebuah pernyataan dari seorang rektor atau mantan menteri pendidikan bahwa potret penyelenggara pemerintah saat ini adalah hasil dari proses pendidikan 25 tahun yang lalu, apakah sudah dapat dikatakan berhasil ?.

Konsep pendidikan Unesco atau Barat bila pada umumnya yang kita pahami adalah menggabungkan antara IQ, SQ dan EQ. Realitasnya, adalah dunia saat ini dari semua aspek dan lini kehidupan telah berhasil mereka kuasai, ralat dan koreksi jika keliru.

Oleh karena itu, sebagai blance atau penyeimbang keberlangsungan alam semesta yang secara kodrat diciptakan berpasang-pasangan, maka kita harus yakin dan lebih mantap dengan prinsip dasar dan tujuan dari pada penyelenggaraan pendidikan kita yakni bangsa Timur, berdiri diatas pondasi filosofis Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, ucap awak media kepada Kasek.

Dialektika percakapan berkesan tergopo-gopo atau tergesa, sangat kental terasa pada percakapan yang berlangsung dengan Ibu Kasek, mengingat sangatlah buanyak tamu yang menunggu, akhirnya beberapa point kesimpulan kita dapati, dari kami awak media jika pada kesempatan pertemuan berikutnya adalah membahas tentang Human Personlity dan Human Dikniti beserta kaitannya.

Konsolidasi yang utuh dari pada unsur-komponen negara, kerja sama yang komprehensif antara elemen bangsa, soliditas yang konstruktif pada semua organisasi-organisasi yang ada, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah, demokratis dalam menyelesaikan masalah, adil individu atau terhadap diri sendiri terlebih adil dan merata bagi segenap tumpah darah Indonesia, prolog komunikasi tekstual adalah prinsipnya.

Dialegtis nuansa percakapan, sesekali komunikasi dihiasi dengan logat kental daerah, mengungkap sekilas tentang performen Ibu Kasek Upt SD Negri wilayah Driyorejo, senyum riang gembira senantiasa menghiasi wajah parasnya, bahkan nyaris tak nampak

Pemerintah Desa Sawahan
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun
Mengucapkan
Selamat Tahun Baru Islam
1 Muharram 1447 H /27 Juni 2025
WAHYU ADITYA PRANATA
Kepala Desa

Kalapas Purwodadi Dampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kunjungan di Lapas Terbuka Kendal



Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto Didampingi Kalapas Purwodadi Erik Murdiyanto berkunjung ke Lapas Terbuka Kendal (Foto: ist)

GROBOGAN, BN – Kalapas Purwodadi ikut ambil bagian dan mendampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berkunjung ke Lapas Terbuka Kendal. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung program-program yang berjalan sebagai bagian dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (17/6).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Agus Andrianto bersama Direktur Jen-

deral Pemasyarakatan, disambut oleh Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah dan Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah, serta jajaran Kepala UPT Pemasyarakatan Jawa Tengah termasuk Kalapas Purwodadi, Erik Murdiyanto.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, mendorong agar program ketahanan pangan yang tengah dilaksanakan Kementerian Impipas memberikan man-

faat langsung bagi Warga Binaan yang aktif mengikuti program tersebut. Hal ini disampaikan saat panen jagung di Sarana Asimilasi dan Edukasi Semar Budal 1, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Kendal.

Warga Binaan yang dapat mengikuti program ini adalah mereka yang telah menjalani 2/3 masa pidana dan sedang mengikuti proses asimilasi jalur pembebasan atau pembebasan bersyarat.

“Kami mendorong agar para Warga Binaan mendapat manfaat keuangan dari program ini dan digunakan sesuai kebutuhan, seperti untuk keperluan pribadi, keluarga, maupun tabungan,” ujar Menteri Agus.

Pada kesesmpatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, menjelaskan hasil penjualan jagung akan dibagi 60 persen untuk Lapas dan 40 persen menjadi ta-

bungan Warga Binaan. “Untuk harga jual, kami sesuaikan dengan harga pasar agar produk kami tetap memiliki daya saing,” terangnya.

Salah seorang Warga Binaan yang mengikuti panen raya tersebut mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- dari hasil penjualan jagung, sementara Warga Binaan lainnya bahkan mendapatkan hingga Rp 500.000,-. “Dana tersebut saya gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga,” ungkapnya.

Ketahanan pangan merupakan salah satu dari 13 program akselerasi strategis yang digagas Menimipas. Pada poin ketiga, ditekankan pentingnya penguatan dan peningkatan pendayagunaan Warga Binaan untuk menghasilkan produk-produk UMKM bernilai ekonomi. Diharapkan program ketahanan pangan ini terus berjalan dan memberikan manfaat baik bagi para pelakunya. (Heru Budianto)

Kapolres Grobogan Ike Yulianto Kukuhkan Tiga Jabatan Utama dan Kapolsek

GROBOGAN, BN – Sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri, Polres Grobogan melaksanakan rotasi sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek jajaran. Sebanyak tiga jabatan utama dan tiga jabatan Kapolsek secara resmi dilantik dan diserahkan dalam proses serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin oleh Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto di halaman Mapolres setempat pada Jum’at (23/5/2025).

Para pejabat utama Polres Grobogan yang dilantik untuk menduduki jabatan baru diantaranya yakni Kabag SDM Polres Grobogan AKP Lamsir yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kasubbag Watpers.

Kemudian, Kasi Humas AKP Danang Esanto selanjutnya mengemban amanah baru sebagai Kapolsek Pulokulon dan Iptu Sartono yang sebelumnya menjabat sebagai Ka SPKT selanjutnya menduduki jabatan sebagai Kapolsek Tawangharjo.

Kasat Resnarkoba Polres Grobogan yang sebelumnya dijabat oleh AKP Eko Bambang Eko Nurtjahjo, kini diserahkan kepada AKP Dedy Setyanto yang sebelumnya merupakan Kapolsek Purwodadi. AKP Eko Bambang selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Kasat Resnarkoba Polres Demak.

Para pejabat utama Polres Grobogan yang dilantik untuk menduduki jabatan baru diantaranya yakni Kabag SDM Polres Grobogan AKP Lamsir yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kasubbag Watpers.

Kemudian, Kasi Humas AKP Danang Esanto selanjutnya mengemban amanah baru sebagai Kapolsek Pulokulon dan



Kapolres Grobogan Ike Yulianto Saat Pimpin Sertijab (Foto: ist)

Eko Bambang selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Kasat Resnarkoba Polres Demak.

Untuk jabatan Kapolsek Purwodadi selanjutnya akan dijabat oleh AKP Siswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Bekpal Polres Grobogan. Dalam amanatnya, Kapolres Grobogan menegaskan bahwa mutasi merupakan hal yang lumrah dan menjadi bagian dari pembinaan karier serta penyegaran dalam tubuh organisasi.

Ia menekankan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada institusi, namun juga kepada masyarakat, bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. “Saya harap kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan dapat dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Kapolsek Grobogan.

Dalam kesempatan itu, AKBP Ike Yulianto menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama khususnya Kasat Resnarkoba AKP Eko Bambang yang selama mengabdikan di Polres Grobogan dapat melakukan berbagai pengungkapan kasus narkoba sehingga berhasil memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mendukung salah satu Asta Cita Presiden Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan.

(Heru Budianto)

Proyek Bronjong Sungai Panusupan Rampung, Warga Ucapkan Terima Kasih Kepada BBWS Citanduy



Proyek bronjong Sungai Panusupan, Desa Lumbr, Kecamatan Lumbr, tampak telah selesai dikerjakan dengan baik. (asep s)

BANJAR, BN – Pekerjaan pemasangan bronjong di aliran Sungai Panusupan, wilayah Desa Lumbr, Kecamatan Lumbr, telah selesai dilaksanakan dengan baik. Proyek ini bertujuan untuk mencegah longsor serta menjaga kestabilan tebing sungai, khususnya saat musim penghujan.

Pelaksanaan pembangunan bronjong dilakukan oleh Iyan, pelaksana asal Cipo-

roan, Kecamatan Banjarsari. Pekerjaan tersebut berjalan lancar hingga tahap akhir, memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat sekitar aliran sungai.

Masyarakat Desa Lumbr menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, khususnya kepada Seksi Operasi dan Pemeliharaan

SDA Wilayah II (SDA OP2), yang telah merealisasikan pembangunan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pak Yahya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas komitmennya dalam mendukung program pengamanan sungai.

“Alhamdulillah, pembangunan bronjong ini sangat

membantu kami. Sekarang kami lebih tenang saat musim hujan datang,” ujar salah satu warga setempat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pelaksana lapangan, dan masyarakat demi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. (Asep sujana)

Perhutani KPH Purwodadi Serahkan Dana Sharing Kayu Sengon Kepada LMDH Jati Makmur

GROBOGAN, BN – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jatipohon kembali menunjukkan komitmennya dalam membina dan memperkuat kemitraan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).



KPH Purwodadi Bersama LMDH Desa Sumber, Jatipohon. (Foto: ist)

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Audiensi ALARM dengan Walikota Banjar Bahas Sengketa Lahan di Muktisari



Tim ALARM saat audiensi dengan Walikota Banjar membahas Sengketa Lahan di Muktisari. (asep)

BANJAR, BN – Puluhan anggota masyarakat Kota Banjar dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) mendatangi kantor Wali Kota Banjar untuk melakukan audiensi terkait sengketa lahan milik ahli waris almarhum Gunawan yang saat ini sudah dikuasai oleh pihak Pemkot Banjar, Kamis (12/06/2025).

Rombongan masyarakat yang didominasi oleh para jawara dari Perguruan Seni Pencak Silat dipimpin oleh Dani Danial Mukhlis, S.Pd.I, selaku tokoh masyarakat didampingi Advokat P. Cahyo Purnomo, SH beserta tim kuasa hukum ahli waris diterima langsung oleh Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono didampingi Sekda Kota Banjar Dr. H. Soni Harison AP, S.Sos, M.Si, beserta jajaran dari dinas terkait di Kota Banjar.

Audiensi diawali dengan pemaparan kronologis sengketa lahan milik ahli waris almarhum Gunawan yang dikuasakan kepada anak tertuanya, Sdr. Adong seluas 373 tumbak, di mana lahan tersebut awalnya secara keseluruhan dikuasai oleh pemerintah Desa Muktisari diduga tanpa alas hak yang sah. Namun setelah diperjuangkan dengan susah payah, akhirnya lahan tersebut sebagian kecil dikembalikan kepada ahli wali waris almarhum Gunawan yakni 100 tumbak, sedangkan sisanya yang 273 tumbak tetap dikuasai oleh pihak Desa Muktisari.

Seiring perubahan dari status Desa Muktisari menjadi Kelurahan Muktisari, saat ini lahan tersebut dikuasai oleh Pemkot Banjar dan menjadi Aset Kota.

Kordinator Alarm Dani Danial Mukhlis, S.Pd.I atau akrab dipanggil Kang Danial yang juga Ketua Paguyuban seni Pencak Silat Kota Banjar memaparkan kedatangannya menghadap Wali Kota Banjar karena naluri kemanusiaannya tergerak oleh nasib salah satu anggotanya yang telunta-lunta memperjuangkan haknya, tidak mendapat perlindungan dari pemerintah khususnya Pemkot Banjar.

“Alarm sebagaimana filosofinya akan hadir, akan berbunyi ketika ketika kami mendapatkan ada ketidakadilan atau ada hal-hal yang di luar kewajaran di lingkungan Kota Banjar,” ujar kang Danial.

Kedatangan Alarm kali ini, lanjut kang Danial, untuk membersamai Sdr. Adong yang juga anggota keluarga besar Seni Pencak Silat Kota Banjar dalam memperjuangkan haknya atas lahan milik orang tuanya sudah berlarut-larut sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang belum selesai yang mana lahan tersebut saat ini dikuasai oleh Pemkot Banjar. Untuk itu, Alarm mendesak Walikota Banjar yang baru menjabat segera menuntaskan kasus sengketa lahan tersebut dengan seadil-adilnya. “Seandainya Pemkot Banjar tidak bisa menyelesaikan kasus ini maka saya pastikan akan sampai ke meja Pak Prabowo (Presiden RI-red),” tegasnya. Menurutnya, negara jangan sampai menindas rakyatnya, justru harus merangkulnya.

Menindaklanjuti paparan Koordinator Alarm, Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono mengaku baru mengetahui adanya kasus sengketa lahan tersebut karena memang baru menjabat beberapa bulan, sedangkan kasus tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Kendati demikian pihaknya berjanji akan mengagendakan pertemuan khusus membahas penyelesaian secepatnya.

“Saya menyediakan waktu hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu dan jam 09.00 sampai jam berapapun untuk menerima pengaduan masyarakat, ataupun masyarakat yang membutuhkan informasi atau kebijakan apapun kedepan,” ujar Wali Kota.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Tim Kuasa Hukum Ahli Waris Almarhum Gunawan dari KLBH DPP AWP Wilayah III Priangan P. Cahyo Purnomo, SH menyampaikan, pihaknya terus mengupayakan penyelesaian sengketa tanah ini secara damai dengan mediasi dan sebagai langkah awal meaksanakan Audiensi dengan Pemkot Banjar berikut Forkopimda Kota Banjar, BPN Kota Banjar dan pihak-pihak terkait lainnya. “Namun apabila upaya mediasi tersebut tidak berhasil maka kami mempertimbangkan untuk melanjutkan ke proses litigasi dan upaya hukum lainnya, untuk melindungi kepentingan klien kami,” ujarnya.

Ditegaskannya, dalam pertemuan dengan Walikota Banjar tadi pagi ada catatan penting yaitu keterangan dari Kabid Aset BPKPD Kota Banjar bahwa yang menjadi dasar hukum Pemkot Banjar menjadikan tanah yang berlokasi di Dusun Babakan RT. 03 RW 04 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar hanya SK Peralihan Aset Kelurahan Muktisari ke Pemkot Banjar, yang ditandatangani oleh dr. Herman Sutrisno selaku Walikota Banjar ketika itu dan terkait Akta Hibah tidak ada.

“Kami menunggu realisasi dari Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Wali Kota Banjar, dimana salah satu poinnya yaitu Wali Kota Banjar sanggup untuk membantu upaya penyelesaian sengketa tanah ini sampai tuntas dan akan melaksanakan kegiatan Audiensi dalam waktu 2 (dua) Minggu kedepan. Untuk itu kami sudah siapkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Sdr. Adong Bin Almarhum Gunawan,” tandasnya.

Pantauan awak media ini, proses audiensi berjalan dengan lancar dan kondusif, diakhiri dengan penandatanganan Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan kasus lahan milik ahli waris almarhum Gunawan oleh Wali Kota Banjar.

(Asep Sujana/Tim Awp)

BBWS Citanduy OP SDA 2, Kurban 7 Ekor Sapi di Masjid At-Taqwa Dobo Banjar

BANJAR, BN – Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1446 Hijriah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA OP 2 melaksanakan kegiatan kurban sebanyak tujuh ekor sapi. Penyembelihan hewan kurban ini dipusatkan di Masjid At-Taqwa yang berada di lingkungan kantor BBWS Citanduy, Dobo, Kota Banjar.

Penanggung jawab kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDA 2, Yahya, menyerahkan langsung tujuh ekor sapi kepada panitia kurban. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan spiritual BBWS Citanduy kepada masyarakat sekitar.



“Kami berharap kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan dan rasa syukur kami kepada Allah SWT. Semoga memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar,” ujar Yahya.

Penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan daging kurban didistribusikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan Dobo, khususnya yang membutuhkan. Warga menyambut dengan antusias dan mengucapkan terima kasih atas kegiatan rutin tahunan ini. Mereka merasa terbantu dan mengapresiasi kehadiran BBWS Citanduy yang senantiasa berbagi di momen hari besar keagamaan.

Kegiatan kurban ini diharapkan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang sebagai wujud nyata sinergi antara instansi pemerintah dan masyarakat. (Asep Sujana)

UPT BLK Kediri Gandeng IKA PMII Gelar Pelatihan Servis Sepeda Motor di Wonodadi Blitar



Pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi yang digelar BLK Kediri di Sekretariat IKA PMII Dusun Wonodadi, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu (21/5/2025). Tampak peserta sangat senang dan antusias mengikuti pelatihan (Foto: ist)

BLITAR, BN – BLK Kediri melaksanakan pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi berlangsung di Sekretariat IKA PMII Dusun Wonodadi, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,

Rabu (21/5/2025). Peserta pelatihan servis sepeda motor diikuti 16 peserta warga Wonodadi Kabupaten Blitar.

Pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi dimulai 29 April hingga 6 Juni 2025, Senin sampai Sabtu aktif masuk waktu pelaksanaan jam 08.00 – 15.00 wib.

Arifin selaku Instruktur Teknik Sepeda Motor (TSM) dari BLK Kediri menyampaikan untuk pelatihan servis sepeda motor bagi peserta dari Wonodadi Blitar diajarkan sesuai 17 unit kompetensi dengan dibekali untuk motor matic bagian cvd dan overfull engine konvensional serta sistem pengapian CDI. “Jadi di luar topik injeksi tetap kita bekal semua peserta di Wonodadi,” ucap Arifin.

Lanjut Arifin selain itu kita bekal

pengenalan komponen-komponen yang ada di sistem injeksi baik genser maupun akuator. Pengenalan cara kerja sistem injeksi dan pengenalan scanner atau diagnostik stolnya untuk motor injeksi.

“Selanjutnya, untuk di Wonodadi kita bekal juga untuk overfull engine konvensional mengenai transmisi, kopling, pengapian, priston, mekanisme katub itu kita ajarkan. Itu yang membedakan pelatihan-pelatihan yang ada di luar,” ujarnya.

Ditambahkan Arifin bahwa kebetulan ini program NPU tapi dibekali uji kompetensi. Jadi ada uji kompetensinya dari BNSP. “Nanti setelah selesai pelatihan selama 35 hari, akan ada uji kompetensi sesuai dengan skema, yaitu servis sepeda motor sistem

injeksi 17 unit kompetensi yang diujikan,” imbuhnya.

Arifin menuturkan setelah peserta mendapatkan pelatihan disini untuk peluang kerja ada sekitar 60 persen, ada yang buka bengkel sendiri dan melanjutkan bengkel milik orang tuanya. “Saya berharap anak-anak bisa sukses semua dan tentunya peningkatan ekonomi bisa lebih bagus,” harapnya.

Sementara, salah satu peserta Burhan warga Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Blitar mengaku ikut pelatihan servis sepeda motor disini ingin menambah skillnya. “Dan rencananya ingin mengikuti kegiatan di bengkel untuk menambah ilmunya agar bisa berkembang dan membuka wirausaha sendiri,” ujar Burhan.

(adv/red)

Lulus 100%, Tasyakuran SDN Kedung Baruk Surabaya Digelar BIDIK NASIONAL, Sederhana Penuh Makna



Para murid, orangtua murid, guru pengajar, Kepala Sekolah SDN Kedung Baruk 1 Surabaya tampak gembira karena lulus 100 %. (red)

SURABAYA, BN – Tercatat Lulus 100% dari jumlah seluruh Siswa/i kelas 6 di SD Negeri Kedung Baruk 1 Surabaya tahun ajaran 2024/2025, Tasyakuran SDN Kedung Baruk Surabaya digelar sederhana penuh makna, disponsori oleh Media Investigasi Koran Mingguan BIDIK NASIONAL & bidiknasional.com, Senin (16/6/2025).

Menuju generasi emas yang cerdas, mau menerima perubahan karakteristik kecerdasan

komprehensif yang produktif, inovatif, berinteraksi sosial, berkarakter kuat, menyehatkan dan berperadaban unggul, merupakan kunci pendidikan membuka pintu masa depan yang lebih baik, panitia penyelenggara Media Bidik Nasional menyajikan beragam penampilan seni dan penampilan para siswa kelas 6 yang tampil memukau.

Acara ini digagas oleh salah satu orang tua siswa sekaligus bekerja di Media BIDIK NASIONAL (BN), didukung penuh oleh seluruh orang tua siswa kelas 6 sebagai bentuk penghargaan kepada anak-anak mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SD.

“Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu mengikuti arus perkembangan jaman yang semakin maju. Selain itu, pendidikan merupakan salah satu sektor penting dan dominan dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa,” ungkap Budi Santoso mewakili Pemimpin Redaksi Bidik Nasional, Drs. Edy Sutanto, SH. di lokasi acara (16/6).

Oleh karena itu sebutnya, pendidikan harus



Budi Santoso, Redpel Surat Kabar Bidik Nasional dan media online bidiknasional.com bersama Kepala Sekolah, orang tua murid dan para murid yang lulus.

menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan sebagai wahana utama pembangunan sumber daya manusia berpartisipasi dalam mengembangkan peserta didik menjadi sumber yang produktif dan memiliki kemampuan profesional dalam meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara.

Sementara, disampaikan Kepala Sekolah SDN Kedung Baruk, Sri Istini dihadapan awak media bahwa, surprise diberikan oleh seluruh wali murid dalam bentuk syukuran tumpengan. “Demikian juga kami sebagai Kepala Sekolah mewakili seluruh jajaran pendidik menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang tua siswa, kami selalu menghargai keinginan yang bersifat positif yang tidak membebani siswa,” ucap Bu Istini sapaan lekatnya.

Setelah ini kata dia, bagi orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, penting untuk memahami tahapan, syarat, dan jadwal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Informasi penting sekolah menengah wajib dipahami. Dengan mengenal sekolah lanjutan berikutnya diharapkan peserta didik didampingi orang tua dapat mengambil keputusan dengan tepat.

Untuk itu ungkapnya, terima kasih kepada orangtua siswa/i yang telah mempercayakan pihak sekolah mendidik anak-anak mereka hingga saat ini telah lulus dan bersiap melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Ia pun menekankan pentingnya anak-anak lulusan SD ini melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Kami berharap orangtua harus memastikan anak-anak melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita mereka. Harapan kami, anak-anak didorong tetap belajar dan terus belajar untuk meraih kesuksesan mereka di masa yang akan datang,” jelasnya.

Sebagai informasi, acara tasyakuran kelulusan siswa/i SDN Kedung Baruk tersebut didukung penuh oleh Forum Pimpinan Media Nasional Jawa Timur (Forpimnas Jatim) terdiri dari puluhan media koran dan media cyber, Gerakan Masyarakat Anti Narkoba (Gaman) Semeru Indonesia (GSI) salah satu relawan pegiat anti narkoba BNN RI, Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Forum Peserta Jaminan Sosial (FPJamsos) serta FIA AUDIO sound sistem pimpinan Bpk. Mustofa di Jl. Medokan Semampir Surabaya.

Selain tumpengan, acara diisi dengan pembagian Surat Keterangan Kelulusan (SKL), pengumuman siswa berprestasi terbaik 1, 2 dan 3 di setiap kelas 6 terdiri dari kelas 6 A, B dan C, pagelaran sendra tari kecak dan paduan suara.

Beberapa sambutan diutarakan oleh Pengawas Sekolah Wilayah Kecamatan Rungkut, perwakilan Wali kelas 6, Ketua Komite SDN Kedung Baruk dan Perwakilan Siswa kelas 6.

Dalam kegiatan ini juga dipaparkan edukasi Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) usia dini oleh Yayasan Gaman Semeru Indonesia. Diakhir, acara ditutup dengan penjemputan siswa oleh orang tua wali murid. (red)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM/KANTOR HUKUM BIDIK NASIONAL.
Jl. Ikan Lele II Blok C-i No 14, Perumahan Bluru Permai, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo, Kab Sidoarjo, Jawa Timur
Telp: 031-99728729, 08123209649, 081330779927, Email:bidiknasional@yahoo.com, Website:www.bidiknasional.com
Advokat: Yustinus Haryanto, SH, Drs Edy Sutanto, SH, Dkk

No : 003/LBH-V-2025/BN
Lamp : 1 berkas
Perihal : **SOMASI**

Kepada Yth,
Sdr. **ABDUL MAJID**
Desa Grogolan RT 06 RW 04
Kecamatan Dukuhseti
Kabupaten PATI
Jawa Tengah

Dengan hormat ,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

--- Yustinus Haryanto, SH.
--- Drs Edy Sutanto, SH.
--- Nur Yahya, SH.
--- Teddy Syah Roni, SH.

Para Advokat dan Penasehat Hukum/Para Legal pada Lembaga Bantuan Hukum/Kantor Hukum Bidik Nasional, beralamat di Jl. Ikan Lele II Blok Ci No. 14, Perumahan Bluru Permai, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klien kami **MAFTUKHAN Dkk** (copy Surat Kuasa terlampir), menunjuk pada permasalahan yang dialami Para Pemberi Kuasa, berkenaan dengan ini kami menyampaikan **SOMASI** , sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami, **MAFTUKHAN, dkk.** sebanyak 7 (tujuh) orang, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa, warga Perumahan Kemiri Indah/Grand Kemiri Residen/ Perumahan Kemiri telah melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan secara dibawah tangan dengan Saudara, selaku **DEVELOPER CV ARSYIL PUTRA** pada sekitar tahun 2014 – 2015 ;

2. Bahwa sesuai kesepakatan klien kami berkewajiban melakukan pembayaran sebesar harga tanah dan bangunan yang ditentukan, sedangkan Saudara berkewajiban untuk menyelesaikan proses kepemilikan atas tanah dan bangunan dimaksud ;

3. Bahwa setelah klien kami memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran secara lunas, Saudara selaku Penjual tidak juga menuntaskan kewajibannya, yakni mengurus penyelesaian SHM dan bangunan klien kami, bahkan sampai dengan saat ini ;

4. Sesuai penjelasan salah seorang klien kami, bahwa Sertifikat Indok SHM tanah klien kami berada dalam penguasaan **Sdri. ARI ISTIQOMAH, S.H., Notaris di Sidoarjo** ;

5. Bahwa klien kami sudah bertahun-tahun berusaha menelusuri keberadaan Saudara, namun tidak membuahkan hasil ;

Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana kami uraikan di atas, melalui **SOMASI** ini kami minta kepada Saudara dengan secara suka rela menemui kami guna menyelesaikan kewajiban Saudara dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan ini, dalam waktu selambat-lambatnya **10 (sepuluh)** hari sejak diterimanya Somasi ini, sebelum kami melaporkan Tindak Pidana yang terjadi, yakni **PENIPUAN** dan **PENGGELOMBONGAN** kepada Pihak **KEPOLISIAN**.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM/KANTOR HUKUM BIDIK NASIONAL.
Jl. Ikan Lele II Blok C-i No 14, Perumahan Bluru Permai, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo, Kab Sidoarjo, Jawa Timur
Telp: 031-99728729, 08123209649, 081330779927, Email:bidiknasional@yahoo.com, Website:www.bidiknasional.com
Advokat: Yustinus Haryanto, SH, Drs Edy Sutanto, SH, Dkk

Demikian **SOMASI** ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Sidoarjo, 03 Mei 2025
Hormat Kami
Kuasa Hukum **MAFTUKHAN, Dkk.**

YUSTINUS HARYANTO, SH.

Drs. EDY SUTANTO, SH.

NUR YAHYA, SH.

TEDDY SYAH RONI, SH.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
Di Sidoarjo ;

2. Yth. Kapolresta Sidoarjo
Di Sidoarjo ;

3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo
Di Sidoarjo ;

4. Yth. Ketua Majelis Pengawas Notaris
Republik Indonesia Daerah Sidoarjo
Di Sidoarjo ;

5. Yth. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten
Sidoarjo
Di Sidoarjo ;

6. Yth. Sdri. **ARI ISTIQOMAH, S.H., Notaris**
Di Sidoarjo ;

7. Arsip ✓

Bupati Labuhanbatu Tekankan Wajib Belajar 13 Tahun Setiap Anak di Seluruh Desa

LABUHANBATU, BN – Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, S.p. OG, M.K.M, menekankan kepada seluruh kepala Desa se Kabupaten Labuhanbatu agar mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk mengikuti program wajib belajar 13 tahun yang telah dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah.

Langkah tersebut dilakukan Bupati dalam rangka mewujudkan generasi emas Kabupaten Labuhanbatu yang cerdas, sehat dan berkarakter serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa titik khususnya pendidikan berkualitas.

Sebagai bentuk percepatan kesuksesan program pemerintah tersebut, Bupati Labuhanbatu melakukan MOU dengan seluruh kepala desa dan Lurah yang ada di Kabupaten labuhanbatu serta kepala sekolah PAUD/TK dan RA yang diselenggarakan di ruang data dan karya Kantor Bupati labuhanbatu Jalan SM Raja, Rantauprapat, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa 17/6/2025.

Menurut Bupati upaya ini tidak akan maksimal tanpa dukungan dan peran aktif dari para orang tua, “Dari MOU ini saya minta kepada Kepala Desa dan Lurah agar berkolaborasi dengan para orang tua, kepala sekolah PAUD/ TK dan RA yang ada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi usia PAUD yang bersekolah sehingga tidak lagi anak usia PAUD yang tidak bersekolah,” harap Bupati.

Mengenai wajib belajar 13 tahun, ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa setiap anak di Labuhanbatu menyelesaikan pendidikan dari jenjang minimal 1 tahun PAUD atau TK, SD hingga SMA atau SMK.

“Tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi atau akses, pemerintah akan terus berupaya menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, meningkatkan kualitas guru, serta memberikan berbagai program bantuan bagi siswa yang membutuhkan,” ujar Bupati.

Menurut dr. Maya, pendidikan adalah pondasi utama kemajuan suatu bangsa. Ia adalah investasi terbaik untuk masa depan, baik masa depan individu maupun masa depan



Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, S.p. OG, M.K.M (pakai batik Korpri).

daerah kita, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak di daerah ini mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Saat ini kita dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan angka partisipasi siswa PAUD dan juga memastikan keberhasilan program wajib belajar 13 tahun: program ini merupakan pilar

penting dalam upaya kita mencetak generasi labuhan batu yang cerdas, terampil, dan berdaya saing.

“Pendidikan Anak usia dini bukanlah sekadar tempat bermain, melainkan fase krusial dalam pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak-anak,” sebut Bupati.

Dalam maklumatnya Bupati mendorong seluruh kepala desa dan kelurahan untuk memastikan setiap anak usia 3 sampai 6 tahun mendapatkan akses layanan PAUD yang inklusif, aman dan bermutu, bupati juga menginstruksikan kepada seluruh kepala desa dan kelurahan agar mengintegrasikan program PAUD ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa termasuk melalui APBdes.

Selain itu bupati juga menegaskan untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Pendidikan, dinas PMD TP. PKK, Himpaudi, IGTKI dan mitra pembangunan lainnya dalam mendukung layanan PAUD holistik, integratif serta menjamin keberlanjutan program PAUD melalui kebijakan regulasi dan dukungan anggaran yang berpihak pada anak usia dini dan pendidikan PAUD.

Di sisi lain mewakili kepala Desa dan Kelurahan se-kabupaten Labuhanbatu, Kepala Desa Pangkatan Rustam Effendi Ritonga dalam maklumatnya diantaranya berbunyi, siap mendukung program bunda PAUD Labuhanbatu dalam rangka penyelenggaraan PAUD yang inklusif dan bermutu di setiap desa serta meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) dengan melakukan pendataan anak usia 3 sampai 6 tahun yang belum mengakses layanan PAUD serta mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak usia dini kesatuan PAUD terdekat.

(M.Sukma)

Bupati Asahan Hadiri Pelantikan Pengurus KONI Sumut Periode 2025-2029



Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar saat menghadiri pelantikan Pengurus KONI Provsu Periode 2025-2029. (TP)

ASAHAN, BN - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Periode 2025-2029 dengan mengangkat tema “Kolaborasi Sumut Berkah dan Berprestasi” yang dilaksanakan di Regale International Convention Centre Jalan H Adam Malik No. 66-68 Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan pada Selasa (10/06/2025).

Dalam kegiatan Pelantikan Pengurus KONI Provinsi Sumatera Utara terse-

but juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sumut (Gubsu) Bobby Afif Nasution dan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dan para kepala Daerah se-Sumut.

Dalam pelantikan tersebut Gubsu Bobby Afif Nasution, mengatakan ada tiga pesan penting yang harus menjadi perhatian pengurus KONI. Pertama, meningkatkan prestasi atlet dan cabang olahraga terutama menuju PON ke-22 di NTT-NTB, kemudian membantu menghilangkan permasalahan dan menjadi solusi untuk penyelesaian

masalah narkoba di Sumut. Selanjutnya, membuat ekosistem olahraga bisa menjadi industri olahraga.

Bobby juga meminta KONI Sumut memiliki cabor unggulan yang nantinya bisa melahirkan atlet nasional. “Selain mengembangkan prestasi atlet, juga bisa melihat cabor unggulan di Sumut. Keleluasaan KONI di kabupaten dan kota untuk bisa sama perjuangkan atlet-atlet di cabor unggulan. Sehingga, kita bisa menjadi salah satu cabor unggulan di Indonesia,” ujar Bobby.

Ketua KONI Pusat, Marciano Norman berpesan agar kepengurusan KONI yang baru bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi. Terutama dalam menyukseskan program pembinaan cabang olahraga dalam melahirkan atlet berprestasi. “Komunitas olahraga itu sangat berarti. Olahraga tidak akan pernah maju, KONI tidak akan pernah mampu melaksanakan tugasnya, tanpa dukungan dari gubernur. Dalam hal ini terutama

kolaborasi dengan gubernur Sumut,” ucap Marciano Norman.

Ketua KONI Provsu, Hatunggal Siregar pada sambutannya mengatakan, KONI Provsu tahun ini membentuk Wakil Ketua untuk Bidang Sarana dan Prasarana. Bidang ini terfokus pada pemanfaatan sarana dan prasarana venue pasca digunakan untuk PON 2024 lalu.

“Bidang ini, kami bentuk agar sarana dan prasarana olahraga di Sumut, terutama eks PON bisa dimaksimalkan untuk prestasi olahraga di Sumut. Tentunya akan dirawat dengan sebaik mungkin,” ungkapnya.

Seementara itu, Bupati Asahan menyatakan siap mendukung prestasi olahraga di Sumatera Utara untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan olahraga unggulan. “Kita dari daerah siap berkolaborasi melahirkan atlet berprestasi,” ucap Bupati Asahan.

(T.P)

Buka Turnamen Sepak Bola Soeratin U-13 dan U-15, Bupati Labuhanbatu : Jaga Sportivitas



Plt Kadispora Kabupaten Labuhanbatu M. Anugerah Perdana Rambe S. STP saat membuka Kompetisi Soeratin di lapangan stadion binaraga (M.Sukma)

LABUHANBATU, BN – Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita Sp. OG. MKM di wakili Plt Kadispora M. Anugerah Perdana Rambe S. STP saat membuka turnamen sepak bola Soeratin U-13 dan U-15 di Lapangan stadion binaraga Kelurahan

Siringgo ringgo Kecamatan Rantau Utara, Senin (16/6/25).

Dana sapaan akrabnya dalam sambutannya menyampaikan kepada para peserta turnamen, pertandingan yang digelar memperebutkan Piala Bupati

Labuhanbatu yang diikuti 13 Club SSB U-13 dan 13 Club SSB U-15 se-Kabupaten Labuhanbatu.

Dana juga mengucapkan selamat bertanding dalam turnamen sepak bola Soeratin U-13 dan U-15 jaga sportifitas saat bertanding. “Karena juara sejati adalah juara yang menjunjung tinggi sportifitas saat bertanding, kalah menang hal yang biasa dalam pertandingan,” ucapnya.

“Karna tim sepak bola yang bermain ini adalah sama-sama masyarakat Labuhanbatu, mari kita ciptakan turnamen sepak bola ini menjadi ajang silaturahmi,” cetus Dana.

Di tempat yang Sama

Ketua Panitia Kompetisai Soeratin U-13 dan U-15 memperebutkan Piala Bupati Labuhanbatu Askab PSSI Labuhanbatu tahun 2025 Fazarsyah Putra sering di sapa Abe saat ditemui di lapangan stadion bina raga mengatakan, di gelarnya Kompetisi Soeratin U-13 dan U-15 untuk mencari bibit bibit muda pesepak bola usia dini.

“Karena banyak pemain sepak bola di Club SSB yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, jadi kita buat kompetisi ini untuk menyalurkan bakat generasi muda usia dini dari U-13 dan U-15 yang selama ini berlatih di Club SSB nya. Jadi bakat nya

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

HUT Bhayangkara Ke 79, Polres Labuhanbatu Salurkan Bantuan Sembako untuk Penggali Kubur



LABUHANBATU, BN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Labuhanbatu menunjukkan kepedulian sosial dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial berupa paket sembako kepada para penggali kubur

yang selama ini berperan dalam pelayanan pemakaman di wilayah Rantauprapat. Kegiatan ini dilaksanakan di Komplek Perkuburan Muslim Jalan MH. Thamrin, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (18/06/2025).

Pemberian bantuan tersebut dipimpin oleh Kassubag Kerma Polres Labuhanbatu AKP AS. Pohan. Mereka menyerahkan langsung bantuan kepada tiga orang penggali kubur yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi di wilayah tersebut.

Adapun masyarakat penerima bantuan sosial adalah Muhammad Budi (42), Rohadi (48), dan Muhammad Syukur (53). Ketiganya merupakan warga Kecamatan Rantau Utara dan telah lama berprofesi sebagai penggali kubur di lingkungan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata empati dan penghargaan Polres Labuhanbatu terhadap profesi yang kerap terlupakan, namun memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-79 yang mengangkat semangat humanis dan berbagi.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasubsi PID M Sie Humas, IPTU Arwin, S.H., menyampaikan “Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama kepada mereka yang selama ini bekerja di balik layar tanpa banyak sorotan,” ujar Iptu Arwin.

Pemberian bantuan ini pun berlangsung dengan hangat dan penuh kekeluargaan. Para penerima menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh jajaran Polres Labuhanbatu.

Dengan semangat Bhayangkara yang terus bertransformasi menuju Polri yang Presisi, Polres Labuhanbatu berkomitmen untuk terus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta hadir sebagai bagian dari solusi sosial di tengah kehidupan warga. (M.Sukma)

Desa Limbongan Beltim Raih Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025



MANGGAR, BN - Desa Limbongan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur (Beltim) berhasil meraih juara pertama penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Beltim melalui Sekretaris DPMDPPKB Melta Indah Nurhayati mengatakan

penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kepulauan Babel kepada Kepala Desa Limbongan Dedi Sugianto pada acara rapat koordinasi pemerintahan desa dan penyerahan penghargaan juara lomba desa dan kelurahan serta lomba teknologi tepat guna tingkat Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Selasa (17/6).

Dengan apresiasi tersebut, Desa Limbongan berhak maju ke kompetisi tingkat regional mewakili Provinsi Kepulauan Babel bulan depan.

Melta menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas prestasi yang dicapai Desa Limbongan. “Alhamdulillah, Kabupaten Beltim berhasil menjadi yang terbaik di Provinsi Kepulauan Babel. Mudah-mudahan untuk persiapan Desa Limbongan pasca lomba desa tingkat provinsi menuju penilaian regional mendapat dukungan dari segenap unsur baik kabupaten maupun provinsi,” ungkapnya kepada DiskominfoSP, Rabu (18/6).

Ia berharap prestasi ini dapat memotivasi desa-desa lain di Kabupaten Beltim untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga prestasi ini dapat diraih Desa Limbongan. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Beltim serta menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk menunjukkan kemajuan di berbagai bidang di desanya,” ujar Melta.

Perlu diketahui, dengan penilaian lomba desa/kelurahan tingkat Provinsi Kepulauan Babel di tahun 2025 ini, Desa Limbongan memiliki kinerja terbaik di bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. (DiskominfoBelitim/As)

Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Tangkap Residivis Kasus Sabu di Merbau



Tersangka SA alias Ustro (33). (M.Sukmo)

LABUHANBATU, BN – Satres Narkoba Polres Labuhanbatu kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Seorang residivis kasus narkotika berinisial SA alias Ustro (33) kembali diamankan setelah kedatangan membawa narkotika jenis sabu di wilayah Dusun II Desa Blungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Penangkapan dilakukan pada Senin malam, 16 Juni 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Tim yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik I Satres Narkoba, IPDA Rahmadhan Hilal, S.E., mengamankan tersangka di pinggir jalan saat tengah berada di lokasi yang terpantau sebagai titik rawan peredaran narkoba.

Kasat Narkoba, AKP Sopar Budiman, SH., menjelaskan “Dari hasil pengeledahan awal, tim menemukan dua bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat bruto 5,22 gram yang terjatuh di atas aspal tepat di tempat tersangka berdiri,” ucap Sopar. Barang bukti lain yang diamankan di lokasi antara lain satu buah dompet kain warna pink, dua helai tisu, satu unit handphone Android merk Samsung warna hitam, serta satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam bernomor polisi B 4953 KKQ yang digunakan tersangka.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasubsi PID M Sie Humas, IPTU Arwin, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya, terlebih pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa. “Ini bukti bahwa perang terhadap narkoba terus kami lakukan secara konsisten. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkoba,” ucap Arwin.

Tersangka berikut barang bukti telah diamankan di Mapolres Labuhanbatu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia. (M.Sukmo)

Antisipasi Banjir, Bupati Sidoarjo Susuri Sungai Mbah Gepuk

SIDOARJO, BN – Banjir di wilayah sidoarjo selatan melumpuhkan jalan raya porong dan sekitarnya dua hari yang lalu. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kepala Dinas PU Binamarga serta beberapa pejabat di Sidoarjo menyusuri sungai Mbah Gepuk, Jum’at (20/06/2025). Kegiatan ini dilakukan dalam upaya normalisasi sungai untuk menekan resiko terjadinya banjir, utamanya kawasan Tanggulangin dan Candi yang kerap menjadi langganan banjir setiap kali musim penghujan.

Dengan menyusuri sungai, menurut Bupati Subandi, paling tidak bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab aliran sungai tidak mengalir lancar. Jika ditemukan banyak endapan lumpur bisa diselesaikan dengan pengerukan sungai serta pembersihan tanaman liar yang menjadi penyebab sungai menjadi dangkal.



Bupati Sidoarjo H. Subandi. (Ist)

“Banyak aliran sungai yang mengalami pendangkalan yang disebabkan tertutup tumbuhan seperti eceng gondok dan kangkung, ini yang menyebabkan aliran sungai tidak lancar untuk itu pada kesempatan ini saya memastikan pengerjaan normalisasi akan terus dikebut”, katanya

Dengan melaksanakan sidak ini telah diketahui apa yang menjadi penyebab banjir, pendangkalan yang terjadi dilakukan pengerukan sepanjang 2,5 kilometer hingga bulan Juli mendatang ditargetkan 3,8 kilometer.

Subandi menegaskan, normalisasi difokuskan di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir, seperti Tanggulangin, Candi, hingga Porong. Ia juga mengatakan akan dibangun DAM di wilayah Kedungpeluk karena hal ini juga sebagai bagian dari pengendalian banjir. “Pemenang proyek sudah ada, tinggal pelaksanaan, Kami

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

Panitia Bersyukur, Kontingen Kejurda Ramai

BELTIM, BN – Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Wydia Kemala Sari mewakili Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani membuka Kejuaraan Daerah Pelajar XII Babel di Kabupaten Belitung Timur tahun 2025. Pembukaan dilakukan di Stadion Rimba Plawan, Kecamatan Damar, Kamis (19/6/25) Sore.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug secara bersama oleh Wydia Kemala, Wakil Kapolda Babel Brigjen Tony Harsono, Anggota DPD RI Perwakilan Babel Bahar Buasan, serta Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar. Turut hadir pula, perwakilan Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kab Beltim.

Sebanyak 766 kontingen dari tujuh Kabupaten/Kota se-Provinsi Babel ikut berpartisipasi dalam kegiatan



Wabup Beltim saat menyapa kontingen dari Kabupaten lainnya. (Ist)

selama empat hari, dari 18 hingga 22 Juni 2025 ini. Tingkat partisipasi kontingen dinilai cukup baik, di tengah kondisi keuangan pemerintah yang terbatas.

Kota Pangkalpinang paling banyak mengirimkan kontingen dengan 150 orang. Kontingen Tuan Rumah Kabupaten Beltim berada di tempat ke dua dengan 131 orang. Sedangkan tetangganya, Kabupaten Belitung di tempat ke tiga dengan kontingen sebanyak 118 orang. Selanjutnya Kon-

tingen Kabupaten Bangka berjumlah 103 orang. Diikuti oleh Kabupaten Bangka Selatan 101 orang.

Kabupaten yang paling jauh, Bangka Barat tak mau ketinggalan dengan kontingen sebanyak 86 orang. Sedangkan Kabupaten Bangka Tengah paling sedikit mengirimkan kontingen yakni hanya 77 orang.

Ditemui usai upacara pembukaan, Wydia mengatakan bersyukur atas tingkat partisipasi Kabupaten/Kota di Provinsi Babel. Meski dae-

rah banyak yang terkendala anggaran namun tetap berupaya mengirimkan kontingennya.

“Kami sangat berterima kasih kepada kabupaten/kota yang tetap mengirimkan atletnya, walau kita ketahui bersama di tengah keterbatasan anggaran ini,” ujar Wydia.

Ajang dua tahunan sekali ini, kata Wydia merupakan seleksi prestasi pelajar, dari tingkat SD hingga SMA. Di mana para pemenang tiap cabang olahraga akan mewakili Provinsi Babel di ajang Pekan Olahraga Nasional (PONAS) September 2025 di Jakarta.

“Harapannya ajang Kejurda ini kita dapat menjaring atlet-atlet berprestasi yang rencana awalnya akan dilaksanakan di Aceh dan Sumut. Namun karena adanya pemangkasan anggaran dilaksanakan di Jakarta, semua kita menyesuaikan,” kata Wydia. (DiskominfoBeltim/As)

Bupati Asahan Lantik 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

ASAHAN, BN - Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S. Sos., M.Si melantik 3 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Rabu (11/06/2025) di aula Melati Pemkab Asahan.

Adapun pejabat yang dilantik pada hari ini yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Pol PP, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Syahputra, S.E., M.M yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Air Batu dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan, Suherman SiregarSiregar, S.STP., M.M yang sebelumnya



Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, saat melantik 3 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Asahan. (tp)

juga menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Asahan.

Bupati menyampaikan jabatan bukanlah hadiah atau penghargaan semata semata, tetapi tanggung jawab yang harus di emban dengan penuh disiplin, dedikasi, loyalitas dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat tetapi juga dihadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa di akhirat kelak.

“Mari jadikan nilai-nilai Aparatur Sipil Negara yang selalu berorientasi pada pelayanan Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam setiap gerak langkah sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk menghadapi tantangan Pemerintah kedepan yang semakin kompleks,” ungkap Bupati. (T.P)

Bupati Asahan Berharap DHC 45 Dapat Menjaga Kelestarian Budaya Perjuangan



Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar. (ist)

ASAHAN, BN- Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si berharap kepada pengurus Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 untuk dapat menjaga dan merawat kelestarian budaya perjuangan di Kabupaten Asahan.

“Sejarah itu tidak boleh dikaburkan dan tempat sejarah harus dirawat, tujuannya agar generasi muda mengetahui dan memahaminya. Kita lahir saja ada sejarahnya,” ucap Bupati saat menerima kunjungan pengurus DHC 45, Kamis (12/06/2025) di ruang kerjanya.

Bupati yang didampingi Asisten Setdakab Asahan, Muhili Lubis, Kadis Sosial, Ashrul Wahid dan Kadis Kominfo, Jutawan Sianaga menyebutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan akan mendukung program kerja DHC 45 Kabupaten Asahan. Apalagi program kerja tersebut untuk melestarikan dan membudayakan nilai-nilai Perjuangan 45 yang ada di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Ketua DHC 45 Asahan, Ridwan sedikit menjelaskan kondisi kepengurusan serta keberadaan kantor yang berada di gedung juang 45 Jalan Hos Cokroaminoto Kisaran perlu mendapatkan perhatian. “Selain pengurus di Kabupaten, ada juga pengurus di

Kecamatan. Dan saat ini terbentuk pengurus Kecamatan sebanyak 17 Kecamatan. Kekurangannya akan terus dilakukan konsolidasi,” ucap Ketua.

Kemudian Ketua juga sedikit menceritakan sejarah Kesultanan Asahan dengan Kerajaan Aceh serta putri Margolang. Dari cerita tersebut terlihatlah tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Asahan. “Sejarah Asahan ini harus diketahui kita semua, sejarah ini saya dengar langsung dari orang tua saya. Dan saya siap menjadi nara sumber dalam sejarah Asahan”. Sambung Ketua sembari mengucapkan terimakasih kepada Bupati Asahan yang telah menerima pihaknya serta dukungannya terhadap DHC 45 Asahan. (T.P)

82,8% Warga Jember Puas Kinerja Gus Fawait



Bupati Jember Gus Fawait.

JEMBER, BN - Lembaga survei The Republic Institute merilis hasil kepuasan warga Jember terhadap kinerja Bupati Muhammad Fawait (Gus Fawait) selama 100 hari awal menjabat. Hasilnya 82,8% warga Jember puas. Peneliti Utama The Republic Institute Dr Sufyanto membeberkan sejumlah sektor yang paling dirasakan programnya oleh warga Jember selama Gus Fawait menjabat.

“Mayoritas masyarakat menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan skor tertinggi pada bidang pelayanan publik sebesar 87,2 persen,” kata Sufyanto dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Sufyanto mengungkapkan kepuasan di sektor pemerintah daerah ini disebabkan keberhasilan Pemkab Jember dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. “Program Wadul Gus’e dan UHC Prioritas merupakan program yang mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat. Penilaian ini secara umum mencakup aspek aksesibilitas, yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan, kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan, serta efisiensi dan proses, yakni kecepatan dan ketepatan layanan yang diberikan,” bebernya.

Selanjutnya, Sufyanto menyebut bidang pembangunan dan infrastruktur juga mendapat respons positif dengan tingkat kepuasan 83,2%. Masyarakat mengapresiasi program seperti URC (UnitReaksi Cepat) dan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.

“Selain itu, bidang Sosial dan Ekonomi, Bidang Pemerintahan Umum, Bidang Transportasi dan Mobilitas turut menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, data survei ini menggambarkan bahwa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jember telah berhasil menciptakan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam waktu singkat,” jelasnya.

Sufyanto juga membeberkan program yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi adalah Platform Aduan Warga (Wadul Gus’e) dengan nilai 83,5. Disusul Program Universal Health Coverage (UHC Prioritas) sebesar 82, dan Perbaikan Infrastruktur melalui Unit Reaksi Cepat (URC) sebesar 80,9

“Program lain yang juga mendapat apresiasi tinggi mencakup pembangunan infrastruktur desa 79,1, Program Miljo Cinta untuk penjaja sayur 78,9, dan 20.000 beasiswa bagi pelajar/mahasiswa ber-KTP Jember mendapat skor kepuasan 78,4,” jelasnya. “Selain itu, Koperasi Merah Putih untuk pemberdayaan desa 78,3, program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) 75, Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu 73,7, dan BPJS Kesehatan untuk pekerja informal 72,8 juga menunjukkan tingkat kepuasan yang signifikan. Data ini mencerminkan bahwa masyarakat Jember menilai positif berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar, pembangunan desa, pendidikan, dan kesehatan,” tambahnya.

Sufyanto menambahkan berdasarkan data survei pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberantasan Kemiskinan, Bupati Jember Gus Fawait menempati peringkat pertama dengan tingkat kepuasan publik sebesar 83,1%. “Capaian ini menunjukkan keberhasilan Pemkab Jember dalam menjalankan program-program yang menysar masyarakat desa dan kelompok rentan secara efektif, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi desa, serta peningkatan infrastruktur pedesaan,” tandasnya.

Survei The Republic Institute dilakukan di seluruh kecamatan di Jember pada 15-22 Mei 2025 dengan melibatkan 800 responden. Survei menggunakan metode Stratified Random Sampling dengan margin of error sebesar 3,46%. (dtc/red)

Bupati Asahan Serahkan Sapi Qurban Presiden Prabowo ke Masjid Raya Kisaran



Bupati Asahan, H. Taufik Zainal Abidin Siregar, saat menyerahkan hewan qurban dari Presiden Prabowo ke Panitia Qurban Masjid Raya Kisaran Sabtu 7 Juni 2025. (tp)

paten Asahan dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban ini. Semoga menjadi berkah dan mendorong tumbuhnya kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ucap Bupati.

Presiden Prabowo Subianto diketahui menyalurkan sebanyak 578 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M. Salah satu daerah penerima adalah Kabupaten Asahan, yang mendapatkan penyaluran langsung untuk Masjid Raya Kisaran.

Setelah prosesi penyerahan, hewan kurban langsung disembelih di halaman Masjid Raya Kisaran, dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Panitia Qurban Masjid Raya Kisaran, Abdul Muhaimin Nasution, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI. (T.P)

Bupati Apresiasi Polres Bogor Beri Nama Pos Gadog dan Jalan Ciawi Gadog Diberi Nama Hoegeng



Bupati Bogor Rudy Susmanto. (Emi)

BOGOR, BN - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengapresiasi langkah Kapolres Bogor yang memberikan nama Pos Gadog Hoegeng dan Pos Soebianto. Menurutnnya nama-nama besar tersebut sangat inspiratif dan memberikan contoh keteladanan.

Demikian diungkapkannya pada Peresmian Pos Gadog Hoegeng di Ciawi, Pos Soebianto di Sentul. Selain dua pos tersebut, diresmikan juga nama ruas jalan Ciawi – Gadog sebagai Jalan Hoegeng.

Peresmian dilakukan Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan. Turut serta dalam peresmian tersebut, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo, anggota DPR RI Komisi V, Marlyn Maisarah, anggota DPR RI Komisi VII, Ilham Permana, Dandim 0621/Kab. Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Keluarga Jenderal Hoegeng, dan jajaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Bupati Rudy menyampaikan bahwa langkah ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi merupakan wujud penghargaan atas jasa dan keteladanan para tokoh nasional. Hari ini anak muda tidak diminta meneteskan keringat, darah dan air mata untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Selanjutnya, Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan turut mengapresiasi Kapolres Bogor atas inisiasinya mau mengubah wajah fisik dari Pospol Gadog ini. Tidak hanya mengubah fisiknya, tetapi pasti bertujuan memberi pelayanan lebih baik dari sebelumnya. “Terima kasih kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. Keberadaan pos-pos ini penting dalam mengatur lalu lintas dan membantu melayani masyarakat,” ujar Irjen Rudi.

Menurut Irjen Rudi, sosok-sosok tersebut penuh integritas, sangat sederhana dan melayani masyarakat. Diharapkan dengan pemberian nama Pospol dan jalan ini dapat menginspirasi kita yang menghuni dan melewati jalan ini khususnya polisi nanti. (emi)

Selesaikan Polemik PWI, Zulmansyah Usulkan Kongres Persatuan Dipercepat



Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang. (Foto: ist)

BANDUNG, BN – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, mengusulkan percepatan pelaksanaan Kongres Persatuan PWI guna menyelesaikan polemik internal dan mencegah berlarutnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi.

Menurut Zulmansyah, usulan tersebut muncul setelah munculnya kembali pernyataan dari Hendry Ch Bangun yang tetap mengklaim dirinya sebagai ketua umum PWI, kendati telah diberhentikan sebagai anggota. “Banyak wartawan di daerah tidak mengetahui bahwa Hendry sudah diberhentikan sebagai anggota PWI. Maka, secara otomatis, dia juga tidak lagi menjabat

ketua umum,” kata Zulmansyah dalam siaran pers, Minggu, 15 Juni 2025.

Pemecatan terhadap Hendry, lanjut dia, dilakukan melalui tiga jalur organisasi resmi, yakni Dewan Kehormatan PWI Pusat, PWI Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah keanggotaannya, dan forum Kongres Luar Biasa (KLB). Bahkan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Maret 2025 memperkuat keputusan DK PWI Pusat, bahwa pemecatan Hendry sebagai anggota PWI sudah final.

Dasar pemberhentian tersebut, menurut Zulmansyah, terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan penerimaan dan pemberian insentif atau “cashback” dari dana bantuan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang bersumber dari Forum Humas BUMN.

Tak hanya itu, Hendry juga disebut menolak keputusan Dewan Kehormatan, melakukan pemecatan terhadap pengurus DK, serta membentuk lembaga tandingan secara sepihak. “Tindakan-tindakan tersebut dinilai melanggar konstitusi organisasi,” ujar Zulmansyah, didampingi Sekretaris Jen-

deral PWI Pusat Wina Armada Sukardi.

Zulmansyah menyayangkan pernyataan Hendry yang muncul hanya sehari setelah penandatanganan kesepakatan bersama di Dewan Pers untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan PWI. Pernyataan tersebut, menurutnya, bertolak belakang dengan semangat rekonsiliasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

“Kalau begini, lebih baik Kongres dipercepat. Kalau bisa bulan Juli, tidak perlu menunggu Agustus,” katanya.

Proses Rekonsiliasi ; Sebelumnya, dua kubu yang berselisih di tubuh PWI telah menandatangani Kesepakatan Jakarta di kantor Dewan Pers. Dalam kesepakatan itu, kedua pihak sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan PWI paling lambat pada 30 Agustus 2025. Panitia pelaksana dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) telah mulai bekerja menyiapkan kongres.

Zulmansyah menegaskan, langkah ini merupakan upaya untuk mengembalikan kesatuan organisasi serta menjaga marwah profesi wartawan. “PWI adalah milik bersama. Jangan sampai dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Status Administratif ; Terkait status hukum, Zulman-

syah menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah membekukan kepengurusan PWI versi Hendry Ch Bangun. Selain itu, Dewan Pers juga tidak lagi mengakui Hendry sebagai ketua umum dan telah melarang penggunaan fasilitas organisasi oleh pihaknya. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai perbedaan antara legalitas administratif dan keabsahan organisasi berdasarkan etik dan konstitusi.

“Putusan sela dari pengadilan bukanlah putusan akhir. Wartawan perlu memahami konteks hukum organisasi secara utuh,” kata dia.

Sebagai penutup, Zulmansyah mengimbau seluruh anggota PWI dan insan pers untuk tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menyikapi berbagai klaim yang beredar. Ia mengajak seluruh wartawan mendukung upaya rekonsiliasi, bukan memperkeruh suasana dengan narasi yang belum tentu benar. “Jangan mudah percaya dengan satu narasi saja. Periksa fakta dan jalankan proses yang sedang berjalan. Mari kita jaga marwah PWI bersama-sama,” kata Zulmansyah.

(Zaen)

Sambungan hal 1

didakwakan oleh JPU. Namun, perbuatan para terdakwa ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau *ontslag*.

Di sini, Kejaksaan Agung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap jumlah uang yang dikembalikan tersebut, Penuntut Umum telah melakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Juni 2025, penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 38 ayat (1) KUHP untuk kepentingan pemeriksaan kasasi.

“Setelah dilakukan penyitaan, Tim Penuntut Umum mengajukan tambahan memori kasasi yaitu memasukkan uang yang telah disita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, guna menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim Agung yang memeriksa Kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut ‘dikompensasikan’ untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi dari para Terdakwa Korporasi tersebut,” ujar Sutikno.

Apresiasi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung menyita Rp11,8 triliun dari korporasi Wilmar Group dalam perkara korupsi persetujuan ekspor CPO periode 2021 – 2022.

“Langkah progresif Kejaksaan Agung ini patut diapresiasi. Ini adalah bentuk nyata komitmen penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan negara,” kata Menko Budi dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (18/6).

Budi menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh penanganan kasus korupsi CPO Wilmar Group yang saat ini sedang diusut Kejaksaan Agung. Ia juga mendukung langkah-langkah pihak di bawah naungan Desk Penindakan Korupsi bentukkan Menko Polkam yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi tersebut.

Budi berharap penanganan kasus korupsi ini bisa berjalan dengan adil dan transparan demi terciptanya keyakinan publik akan kinerja penegak hukum Indonesia. “Penanganan kasus ini akan menjadi contoh penting dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Pemerintah akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas,” kata Budi.

(hukumonline.com/red)

Sambungan hal 1

dan sudah terlalu mepet akhir tahun 2024 dan bila dikerjakan saat itu tidak sampai dengan batas waktunya, sebenarnya biar dana tersebut masuk dana Silpa dan Tahun berikutnya masih bisa diharapkan untuk dimohon kembali,” ujarnya.

Dikatakan Heru temuan ini harus segera ditindak lanjut jika ada dugaan indikasi penyimpangan, maka pihak berwenang/APH harus mengambil langkah hukum, masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran BKK Provinsi Jawa Timur mereka kelola. Untuk proyek tersebut harus diawasi terus menerus

secara ketat untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standart yang ditetapkan,” dugaan permainan dalam proyek BKK Provinsi Jawa Timur DPRD ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut, langkah tegas diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat dari pihak wewenang/APH memastikan tidak ada dugaan penyalahgunaan anggaran proyek tersebut,” tegas Advokat Lumajang ini. (Son/bersambung edisi berikutnya)

Oknum Guru SMPN 1 Pusakanegara Diduga Lakukan Kekerasan ke Siswa



SUBANG, BN – Dugaan kekerasan terhadap siswa kembali mencoreng dunia pendidikan. Seorang siswa SMP Negeri 1

Pusakanegara berinisial S (16), warga Desa Pusakanegara, Kabupaten Subang, Jawa barat, diduga mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru di sekolahnya.

Peristiwa terjadi pada hari Jumat, bulan Mei 2025. Hingga hari ini, Selasa (11/6), korban masih menjalani perawatan medis akibat nyeri berkelanjutan di area kepala yang diduga sebagai dampak dari pemukulan tersebut.

Menurut keterangan ibunda korban, Resini, anaknya bersama dua siswa lain dipanggil masuk ke ruang guru oleh dua oknum guru berstatus honorer, yakni Ibu Asma dan Ibu Ayu. Di dalam ruangan sudah hadir pula seorang guru PNS/ASN bernama Drs. Tri Djatmiko. Setelah pintu ruangan dikunci, ketiga siswa diduga langsung mendapatkan kekerasan fisik, mulai dari tamparan, pukulan hingga cekikan terhadap Supriatna.

“Anak saya ditampar dan dicekik di depan dua guru lainnya yang tidak menghentikan tindakan tersebut. Bahkan Ibu Asma terus mengomel dan menyudutkan mereka,” ujar Resini kepada bidiknasional.com.

Dalam proses konfirmasi dan klarifikasi, pihak keluarga justru mendapatkan pernyataan yang mengejutkan dari salah satu guru yang mengatakan bahwa “siswa yang susah diingatkan harus diberi efek jera dengan kekerasan”.

Menanggapi kasus ini, Agus selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 1 Pusakanegara menyampaikan bahwa pihak sekolah baru mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang tua siswa. “Kami belum menerima laporan resmi sebelumnya. Informasi ini baru kami terima dari aduan pihak keluarga,” kata Agus.

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak sekolah, diketahui bahwa dugaan kekerasan ini dipicu oleh permasalahan sebelumnya, yakni dugaan pemalakan yang dilakukan oleh Supriatna di lingkungan sekolah. Namun, menurut keterangan sementara, tindakan tersebut dilakukan atas suruhan dari dua temannya yang juga terlibat dalam insiden pemanggilan ke ruang guru.

Pihak keluarga tidak menampik adanya kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak mereka, namun menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. “Kalau memang anak kami bersalah, harusnya diproses secara pembinaan dan prosedur, bukan dipukul seperti itu,” tambah Resini.

Atas kejadian ini, keluarga korban menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah dan meminta agar insiden ini diproses secara hukum agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Mereka juga meminta agar Dinas Pendidikan menindak lanjuti peristiwa ini secara objektif dan profesional. Media BN akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas.

(M.Tohir/tim)

Antisipasi Banjir ...

Sambungan hal 9

akan terus kontrol biar sungainya bersih dan paling tidak ditahun depan tidak ada dampak banjir, jika anggaran kurang akan kami siapkan lewat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” ujarnya.

Iapun menambahkan jika Pemprov Jawa Timur juga telah mengucurkan dana sebesar Rp 37 miliar, dengan harapan dengan dana yang besar ini bisa menangani masalah banjir yang selama ini melanda wilayah Sidoarjo sehingga tidak terulang di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, sidak bupati dilakukan di aliran sungai Sidokepuh mulai dari Ngaban hingga Kedungpeluk dengan total panjang sungai mencapai enam kilometer.

“Untuk tahap awal fokus pada normalisasi sepanjang dua kilometer dari Ngaban hingga Balonggabus yang akan dikerjakan dalam dua minggu ke depan, kemudian pada Juli akan dilanjutkan pekerjaan kontraktual sepanjang 3,8 kilometer dari Balonggabus ke jembatan Kedungpeluk dan Selain melakukan pengerukan, juga dilakukan pengerjaan yang meliputi pembersihan tumbuhan liar yang menyumbat aliran air,” katanya.

Ia juga menambahkan jima banjir yang

sempat menggenangi Jalan Raya Porong lebih disebabkan oleh kontur tanah yang landai dan intensitas hujan ekstrem. seperti tercatat bahwa Curah hujan yang terjadi mencapai 114 mm yang terjadi dalam tiga jam dan itu sudah termasuk kategori ekstrem ditambah lagi lokasinya yang memang tanahnya mengalami penurunan, namun untuk ini sudah disiapkan dua pompa oleh pemerintah pusat, masing-masing di Ketapang dan Siring.

“Sungai-sungai besar di Sidoarjo merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pihaknya tetap melakukan pendampingan teknis, seperti pembersihan dan pengangkatan tanaman liar, seperti di wilayah Sidokepuh ini alirannya langsung ke laut, jadi kewenangannya ada di balai pusat. Tapi kami tetap bantu secara operasional karena dampaknya banjir di wilayah kami,” ucapnya.

Dwi Eko juga menegaskan jika kapasitas sungai di Sidoarjo saat ini masih mampu menampung curah hujan hingga 70 mm. Namun jika lebih dari itu, air akan meluber ke permukiman dan jalan raya. Untuk itu dilakukan pengendalian dari pesisir Mengare. “Kita pastikan kapasitas sungai di kawasan padat seperti Tanggulangin dan Candi bisa optimal saat musim hujan,” pungkasnya. (yah)

PN Sidoarjo ...

Sambungan hal 1

pemilik sah lahan setelah gugatan mereka dimenangkan hingga tingkat kasasi.

“Alhamdulillah, meski penuh tantangan, eksekusi akhirnya terlaksana,” ujar Abdul Salam, kuasa hukum PT Kejayan Mas. Ia menyebut pembacaan eksekusi terpaksa dilakukan dari sisi samping karena area utama dikuasai warga.

Menurutnya, ini adalah upaya ketiga sejak Februari 2025. Dua eksekusi sebelumnya gagal karena penghadangan oleh warga. Namun, pihak termohon menilai pelaksanaan eksekusi cacat secara hukum. Kuasa hukum mereka, Andi Fajar Julianto, menyebut pemberitahuan eksekusi tidak sesuai prosedur.

“Surat fisik baru kami terima hari ini pukul 10 pagi. Informasi dari kepala desa, surat itu baru disampaikan kemarin, tanggal 17 Juni, pukul 2 siang. Ini jelas melanggar ketentuan administratif,” tegasnya.

Andi juga menyinggung adanya unsur pidana dalam kasus ini. Ia menyebut Agung Wibowo, salah satu pihak terkait, telah dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan atas objek sengketa. “Tiga sertifikat atas nama klien kami juga dinyatakan harus dikembalikan ke pemilik asal dalam putusan pidana,” ungkap Andi.

Sementara itu, Ketua Panitera PN Sidoarjo, Rudi Hartono turut membenarkan bahwasannya telah membacakan penetapan Eksekusi disisi lain dari obyek sengketa.

Dikarenakan, keadaan ribuan massa yang telah mengepung pihak Juru Sita (JS) PN Sidoarjo dan Pihak Polresta Sidoarjo. Akhirnya, JS memasuki wilayah obyek sengketa lewat pintu lainnya. “Massa kepung saya dan Pak Kapolresta Sidoarjo, tapi Juru Sita dibiarkan oleh massa. Akhirnya, memasuki obyek sengketa dan membacakan penetapan eksekusi dilain sisi,” pungkas Rudi Hartono.

Berikut rincian tiga sertifikat yang menjadi objek eksekusi: 1. SHGB Nomor 415/Desa Tambakoso, Luas: 4.033 m², Tanggal: 18 Juni 2018, Pemegang hak: PT Kejayan Mas. 2. SHGB Nomor 414/Desa Tambakoso, Luas: 36.694 m² Tanggal: 21 Maret 2018, Pemegang hak: PT Kejayan Mas. 3. SHGB Nomor 413/Desa Tambakoso Luas: 57.741 m² Tanggal: 21 Maret 2019 Pemegang hak: PT Kejayan Mas. (Teddy Syah Roni)

Proyek BKK ...

Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang diterima Kades Dorogowok Sura’i beserta bendahara desa Novi, namun anggaran tersebut oleh Kades Sura’i dibawa kemana dan tidak ada yang tahu. Diduga uang diserahkan kepada pihak ketiga dan mereka diduga dapat fee. “Sebetulnya saya tahu nilai jumlah rupiahnya yang diterima, tetapi saya tidak berani menyebutkan karena khawatir Pak Kades Sura’i tidak mengakui/mengelak,” tandasnya.

Lanjut sumber itu, untuk pelaksanaan proyek harus ada SK dari desa dan juga

ada pemberdayaan warga dilibatkan untuk bekerja dalam proyek tersebut, apakah betul-betul dilaksanakan?. Sementara Advokat yang berdomisili di Lumajang, Heru Laksono,SH., mantan anggota DPRD Kab. Lumajang, menyroti kasus ini kuat dugaan ada permainan proyek/bancakan proyek BKK Provinsi Jawa Timur dengan nilai sangat fantastis Rp. 1,475 Milyar tersebut. “Apalagi proyek tersebut BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, dan dikerjakan tahun 2025 sampai sekarang belum selesai, seharusnya bila pencairan

Ketua DPRD Magetan Kunjungi Puskesmas Panekan



Ketua DPRD Magetan Ratno didampingi Kepala Puskesmas Panekan Drg. Ari Wibawa saat mengunjungi Gedung Puskesmas Panekan.

MAGETAN, BN - Proyek berkelanjutan bangunan Puskesmas Panekan yang diharapkan Kepala Puskesmas Panekan Drg. Ari Wibawa bisa dilanjutkan untuk tahun 2025. Ketua DPRD Magetan, Ratno, Rabu (18/6) meninjau langsung bangunan tersebut, bahkan Ratno menyempatkan diri memeriksakan kesehatan di Puskesmas tersebut.

Pemeriksaan kesehatan meliputi laboratorium, phisik, kolesterol, tekanan darah dan sebagai nya, Ratno pun mengikuti dari pengecekan tekanan darah, gejala penyakit diabetes dan lain-lain.

Seusai memeriksakan kesehatan diri, kemudian meninjau juga kinerja dan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas termasuk ruang rawat inap yang ada sambil menanyakan para pengunjung yang antri atau pun yang berada di rawat inap.

Ratno berkomentar saat usai memeriksakan kesehatan diri, memberikan apresiasi kepada para staf puskesmas Panekan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat secara bagus.

“Berdasarkan program Visi Misi Bupati

saat mencalonkan bupati kemarin, untuk itu setelah itu visi misi tersebut diwujudkan dan diselaraskan dengan program Gubernur Jawa Timur dan Nasional, maka peningkatan status Puskesmas ke rumah sakit sangat perlu baik dari segi sarana dan prasarana perlu diadakan dan sediakan termasuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan ke masyarakat tidak boleh diabaikan,” kata Ratno.

Akhir kata Ratno pun mengucapkan, untuk Komisi C segera turun langsung ke Puskesmas-puskesmas terkait progres pelayanan kesehatan gratis yang ada sampai sejauh mana kegiatan tersebut terlaksana karena pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara gratis, Kabupaten Magetan berada di posisi 4.

Himbauan Ratno Ketua DPRD, Kepada seluruh masyarakat Magetan di ajak untuk memeriksakan kesehatan diri secara gratis di Pukesmas-puskesmas dan posyandu yang ada di seluruh Kabupaten Magetan dan saat posisi dimana pun berada atau beda kecamatan tempat tinggal tiada masalah. “Untuk progres pembangunan puskesmas Panekan Tahun 2025 dilanjutkan karena telah dianggarkan, ucap Ratno pula.

Keterangan langsung dari Drg. Ari Wibawa Kepala Puskesmas Panekan Magetan, penyediaan rawat inap yang normal 38 kamar, untuk Rumah Sakit Type D harus mempunyai sarana rawat Inap 50 kamar, sehingga hanya menambah sedikit saja penyediaan kamar rawat inap saja. (Adv/Ashar)

Satpol PP Magetan Bea Cukai, Polisi dan Kejaksaan Kembali Gelar Operasi Gempur Rokokl legal



Tim gabungan Satpol PP Magetan, Bea Cukai, Kepolisian dan Kejaksaan saat sidak langsung Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Parang, Poncol dan Plaosan Kabupaten Magetan. (Ashar)

MAGETAN, BN - Bulan Mei 2025 dan Juni 2025 ini tim gabungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan bidang Penegakan Perda (Gakda) bersama Bea Cukai Madiun dan Aparat Penegakkan Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Magetan melakukan operasi Gempur Rokokl legal.

Operasi yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juni 2025 di tiga lokasi Kecamatan, yaitu Parang, Poncol dan Plaosan. Tim menyusuri toko-toko dan warung-warung dan sebagainya hasil nya pun nihil.

Wartawan Bidik Nasional (BN) pun mengikuti operasi pada hari pertama (24/5) di lokasi Kecamatan Plaosan Magetan dari toko ke toko dan dari warung ke warung, namun hasil nya kosong dalam operasi gabungan Gempur Peredaran Rokok Ilegal dan hasil nya juga sama dengan di 2 kecamatan lainnya.

Twintan dari kejaksaan yang merupakan salah satu tim gabungan menyampaikan saran kepada pemilik toko dan atau pun warung bahwa, jangan tergoda rayuan Sales (penjual) yang menawarkan rokok ilegal untuk dijual kembali, meskipun harga murah.

“Dampak nya bila ibu pemilik toko/warung membeli nya dan terus menjual kembali akan merepotkan kembali kepada bapak/ibu kedepannya, paling tidak panjenengan akan direpotkan dengan pikiran dan waktu agak lama untuk penyelesaian penjualan rokok ilegal,” kata Twintan.

Silih berganti antara petugas Satpol PP, Bea Cukai, kepolisian dan kejaksaan sesaat sebelum meninggalkan toko atau pun warung tersebut agar mereka tidak akan menjual rokok ilegal sampai kapan pun, karena bagi pembeli akan lebih berbahaya dampak kadar Nikotin yang tidak terdeteksi, bagi pemerintah tidak ada pajak yang masuk ke Negara dan masyarakat pun juga dibuat rugi akibat dari pajak rokok ilegal tidak masuk ke Negara, sehingga Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau tidak ada kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri khusus nya di bidang Kesehatan.

Gunendar mengutarakan, meskipun indikasi peredaran rokok ilegal masih terjadi secara terselubung, pihaknya tetap secara rutin mengadakan patroli baik secara langsung seperti saat ini atau secara lain nya dan meskipun sistim peredaran rokok ilegal jauh berbeda seperti hal nya pemanfaatan platform online dan atau bisa juga distribusi dari rumah ke rumah atau langsung perorangan.

“Berdasarkan hal itu, kami terus menjalin kerja sama dengan aparat desa, tokoh masyarakat serta memaksimalkan peran Satgas Rokok Ilegal di tingkat Kecamatan secara intensif,” ujar Gunendar.

Ia berharap kolaborasi ini mampu menciptakan kesadaran yang lebih luas di masyarakat agar tidak lagi mengonsumsi, memproduksi, maupun mengedarkan rokok ilegal.

Gunendar pun menjelaskan, bahwa dari hasil gelar operasi secara langsung dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Magetan saat Tahun 2022 hingga Tahun 2024 mengalami penurunan yang arti nya para penjual dan para pembeli rokok ilegal sudah memahami dan mempunyai kesadaran tinggi tentang Rokok Ilegal sangat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.

“Meskipun hasil operasi di Tahun 2024-2025 ini tidak seperti operasi yang dilakukan di Tahun 2022 - 2023 masih menemukan peredaran rokok ilegal di toko-toko dan atau pun diwarung-warung namun di Tahun 2025 ini minim sekali temuan peredaran adanya rokok ilegal,” ucap Gunendar. (Adv/Ashar)

Kenduri Haul Bung Karno 2025 Dihadiri Sejumlah Menteri dan Ibu Megawati



BLITAR, BN - Sejumlah Pejabat turut menghadiri Haul Bung Karno yang digelar pada Hari ini Jumat (20 / 6/2025). Acara digelar di sepanjang jalan Soekarno mulai perempatan PGSD hingga depan makam Bung Karno, sejumlah tamu kehormatan hadir diantaranya Walikota Blitar Syauqul Muhibbin, Wakil Walikota Blitar Elim Tyu Sambar, Kapolredta Blitar, Dandim, serta Danyon 511 Blitar, Megawati serta sejumlah menteri di kabinet Indonesia Bersatu juga hadir.

Selain juga terlihat hadir tokoh-tokoh PDIP Ganjar Pranowo, Daud Abdullah P, anggota DPRD kota

Blitar serta Bupati Blitar drs. H Rijanto MM serta anggota DPRD kabupaten Blitar. Sedang yang mengisi pengajian dan doa adalah Gus Muwafiq.

Sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Hari Selasa (18/6) juga datang ke Blitar untuk ikut membuka dan meramaikan Blitar Jadul yang digelar mulai 18 - 22 Juni 2022.

Saking banyaknya tamu yang hadir sampai hotel - hotel kelas atas tidak dapat menampung tamu. Oleh karena itu pemkot juga merekomendasikan untuk menginap dihotel Kediri dan Tulungagung.

Acara dimulai jam 19.00 WIB tamu tamu mulai hadir di jalan Soekarno mulai PGSD hingga depan makam sang proklamator Bung Karno. Mulai dari Walikota, Wakil Walikota, sejumlah menteri, Megawati, Forkopimda serta pejabat di lingkungan pemerintah Kota Blitar. Usai dibacakan sejarah Bung Karno yang isinya berisi tentang lahirnya Bung Karno hingga kematiannya pada tanggal 20 Juni 1970.

Soekarno lahir dari pasangan Soekemi Sosrodiningrat dan Raden Ayu Nyoman Rai pada 6 juni 1901 di Surabaya. Ir.Soekarno yang dilahirkan 6 Juni 1901 dan meninggal pada 21 Juni 1970 biasa dipanggil dengan Bung Karno adalah negarawan dan Presiden Republik Indonesia yang pertama memimpin Republik Indonesia mulai 1945 sampai 1970.

Ia menjadi Presiden Republik Indonesia pertama setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama wakilnya Drs. Muhammad Hatta. Masa kecil hanya beberapa tahun hidup bersama kerja orang tuanya di Surabaya. Selesai Sekolah Dasar hingga Tamat, Soekarno hidup indekost di rumah Haji Omar Said Tjokroaminoto politisi kawakan pendiri partai Syarikat Islam. Soekarno lalu melanjutkan sekolah di HBS (Hogere Burger School). Saat belajar itu Soekarno telah memupuk nasionalisme di sanubarinya. Usai lulus HBS pada tahun 1920 Soekarno lalu pindah ke Jawa barat melanjutkan sekolah ke THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang Sekarang disebut Institut Teknologi Bandung (ITB). Beliau berhasil meraih gelar Insinyur pada 25 Mei 1926.

Kiprah Soekarno pun berlanjut ke dunia politik. Kemudian Pria yang akrab dipanggil Bung Karno merumuskan ajaran Marhaenisme serta mendirikan partai yang bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927. Tujuan didirikannya partai ini untuk menuju Indonesia Merdeka.

Kumpeni Belanda yang tidak senang dengan pergerakan Bung Karno lantas mengambil tindakan agar pemerintah India Belanda saat itu masih kokoh berdiri di tanah jajahannya.

Setelah aktif dalam pergerakan perjuangan terus diawasi Belanda hingga berkali kali diasingkan sampai dipenjarakan.

Soekarno yang dikenal sebagai pemimpin khatismatik serta katakteristik yang kuat Dan dialah yang meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Usai pembacaan biografi Soekarno maka acara dilanjutkan dengan pembacaan doa dan acara 1000 tumpeng telah dilaksanakan oleh pemerintah dan warga kota Blitar. (Adv/Sastro)

Tingkatkan Kapasitas Kelompok Tani Ternak, DKPP Kabupaten Madiun Adakan Pembinaan



Pembinaan Kelompok Tani Ternak oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sub. Bidang Peternakan di Aula Kantor DKPP Kabupaten Madiun (18/6). (Ist)

MADIUN, BN - Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sub. Bidang Peternakan, hari Rabu (18/06/2025) mengadakan pembinaan terhadap kelompok tani ternak (kambing/sapi) yang teralokasi menerima bantuan pada tahun 2021 – 2022 dan 2024 - 2025 yang diikuti sekitar 25 kelompok tani ternak, dimana tiap kelompok diwakili 2 peserta, bertempat di Aula Kantor DKPP Kabupaten Madiun. Turut hadir para narasumber dari Inspektorat serta Dinas pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

Acara dibuka oleh Drh. V. Bagus Sri Yulianta Kepala Bidang Peternakan yang mewakili Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Pada kesempatan itu menuturkan, salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sub. Bidang Peternakan yaitu melakukan pembinaan terhadap kelompok tani ternak, yang bertujuan agar dapat mengembangkan potensi Peternakan yang dimiliki, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang Peternakan serta dapat meningkatkan produktivitas dari hasil peternakan, yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan dari anggota kelompok tersebut.

Lanjutnya, selain itu agar kelompok tani ternak bisa berinovasi, melakukan diversifikasi produk sehingga dapat menambah pendapatan, yang akhirnya bisa membangun kemandirian kelompok tani ternak dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar, serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.

Di tempat yang sama, Sri Sudiatu Muviedha narasumber dari Inspektorat Kabupaten Madiun mengatakan, kelompok tani ternak menerima bantuan dari pemerintah secara kelompok, jadi kelompok harus bekerja sama dengan baik dan kompak, karena segala sesuatunya dipertanggung jawabkan secara bersama-sama.

Sedang bantuan ternak diberikan dengan tujuan untuk bisa berkembang biak dan menambah populasi ternak, sehingga kesejahteraan anggota meningkat, tentunya juga harus dibarengi dengan tertib administrasi dan pelaporan, sehingga kelompok akan berjalan sesuai dengan perencanaan dan terhindar dari masalah hukum.

“Mengapa perlu dibentuk kelompok tani ternak”, kata Sepi Muhamad Rofei selaku narasumber dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengawali bicaranya.

Dengan dibentuknya kelompok tani ternak, tentunya akan lebih efisien meningkatkan produktivitas dan pemasaran secara bersama sama, selain itu dapat memudahkan akses permodalan, pengembangan diri, pemberdayaan, pengembangan wilayah dan meringankan penanggulangan masalah.

“Dengan demikian pembentukan kelompok tani ternak sangat berguna untuk memajukan sektor peternakan, meningkatkan kesejahteraan peternak dan mendukung pembangunan ekonomi pedesaan,” jelasnya.

Untuk itu, strategi menumbuhkan dinamika kelompok yang positif dan produktif sangat diperlukan, melalui peningkatan aktivitas penyuluhan dan pelatihan, penguatan kepemimpinan dan peran anggota, pengembangan motivasi dan pengalaman anggota serta mendorong anggota mencari informasi dan inovasi baru.

“Ditunjang dengan melakukan kegiatan pencatatan kegiatan oleh kelompok yang biasa disebut Administrasi Kegiatan serta pencatatan



Para peserta Kelompok Tani Ternak sedang serius mendengarkan penyuluhan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sub. Bidang Peternakan. (Ist)